



**LAPORAN KINERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2024**



**Alamat : JL.A.Yani Km. 4 Kec Kel. Batu Piring  
Kecamatan Paringin Selatan**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2024 dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan fungsi yang dipercayakan.

Hal ini menunjukkan bahwa, Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan disampaikan setiap tahun kepada yang berkepentingan terutama bagian yang terpisahkan dengan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Disadari dalam penyusunannya masih banyak kelemahan, untuk itu diharapkan saran dan kritik pada semua pihak sebagai penyempurnaan. Akhirnya semoga laporan kinerja ini menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan di tahun mendatang.

Paringin, Januari 2025  
KEPALA DINAS PUPRPERKIM  
KABUPATEN BALANGAN



Hj. RAHMADIAH,MT  
NIP.19760309 2006042 007

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang, serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dari output pembangunan infrastruktur terbangun tersebut diharapkan dapat tercapai *outcome* yang berkelanjutan dan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan infrastruktur dasar.

Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DisPUPRPERKIM) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.944.827.912.597,00. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp.822.247.271.655,00 atau sebesar 87,03%.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2024 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan terdapat 6 (enam) sasaran dan 9 (sembilan) indikator sasaran, untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2024.

Secara keseluruhan sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kabupaten Balangan termasuk kategori **Sangat Memuaskan**, yaitu indikator kinerja

:

1. Persentase jalan dalam kondisi mantap
2. Persentase jembatan dalam kondisi mantap
3. Persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik
4. Persentase pengembangan pengendalian banjir
5. Persentase bangunan/Gedung public yang termanfaatkan
6. Persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang
7. Persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak
8. Persentase Kawasan pemukiman yang layak
9. Persentase rumah layak huni

Pencapaian Sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan adalah “**Sangat Memuaskan**”, secara jelasnya **(sembilan) indikator kinerja sasaran** berkategori **Sangat Memuaskan** yaitu sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATAGORI CAPAIAN
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	63,47%	65,19%	102,71%	Sangat Memuaskan
	Persentase jembatan dalam kondisi mantap	92,02%	92,02%	100,00%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya kualitas pengendali banjir dan irigasi	Persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik	34,55%	34,55%	100,00%	Sangat Memuaskan
	Persentase pengembangan pengendalian banjir	20,68%	24,15%	116,78%	Sangat Memuaskan

Meningkatnya pemanfaatan bangunan/Gedung publik	Persentase banguna/Gedung public yang termanfaatkan	94,00%	94,35%	100,37%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya kualitas pengaturan dan pembinaan tata ruang	Persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang	42,00%	42,00%	100,00%	Sangat memuaskan
Meningkatnya kualitas hasil konstruksi	Persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Kawasan permukiman yang layak	91,71%	94,38%	102,91%	Sangat Memuaskan
	Persentase rumah layak huni	96,00%	97,14%	101,19%	Sangat Memuaskan

Dalam melaksanakan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan kerap mendapatkan kendala. Kendala yang dihadapi antara lain : kesulitan dalam pembebasan lahan, kondisi sosial dan gangguan keamanan, terjadinya bencana alam/banjir dan sebagainya.

Adapun beberapa upaya percepatan mulai dari pemrograman hingga pelaksanaan meliputi memfokuskan program strategis, peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan koordinasi dan kolaborasi bersama seluruh stakeholder terkait.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk kedepannya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance.

Akan selalu mencoba membuat solusi pemecahan masalah sebagai tindak lanjut mengatasi beberapa kendala yang dihadapi, adapun solusi yang akan kita lakukan adalah :

- ✓ Mencari dana yang bersumber dari pihak ketiga (CSR) dan lainnya untuk percepatan penuntasan Rumah Tidak Layah Huni (RTLH).
- ✓ Penataan kawasan permukiman baru agar tidak menimbulkan kawasankumuh baru.
- ✓ Menambah wawasan pengetahuan ASN mengikuti diklat pada Kementerian Teknis dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Aspek Strategis Organinsasi dan Pemasalahan Yang Dihadapi.....	3
1.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	8
1.4 Landasan Hukum.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Perencanaan Strategis.....	11
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2023.....	18
3.2 Analisa Capaian Kinerja.....	19
3.3 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	73
3.4 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023..	76
3.5 Daftar Prestasi SKPD Tingkat Nasional /Provinsi, dan Sebagainya.....	77
BAB IV PENUTUP.....	78

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintah Daerah bidang pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang, serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi, perumahanrakyat dan kawasan permukiman;

- d. Evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi, perumahanrakyat dan kawasan permukiman;
- e. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan sebagai perangkat organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan terdiri dari Kepala Dinas / Pejabat Eselon II, kesekretariatan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Penataan Ruang, Jasa Konstruksi dan Peralatan serta Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman setingkat Eselon III dan Unit Pelaksana Teknis. Perangkat sekretariat terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan sub bagian Perencanaan dan Pelaporan. Bidang Bina Marga terdiri dari Jf. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda, Bidang Cipta Karya terdiri dari Jf. Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Muda , JF. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda, Bidang Sumber Daya Air terdiri dari Jf. Teknik Pengairan Ahli Muda, Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan terdiri dari Jf. Teknik Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, Bidang Penataan Ruang terdiri dari Jf. Teknik Penata Ruang Ahli Muda serta Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari Jf. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda.

## **1.2 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan yang Dihadapi**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan sebagai dinas pelaksana teknis sesuai dengan tupoksinya mempunyai fungsi strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Balangan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan dihadapkan dengan beberapa kendala dalam pemenuhannya, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGANSKPD)	
1	2	3	4	5	6
Persentase jalan dalam kondisi mantap	65,19%	14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketersediaan sumber dana	Kondisi Cuaca dan Partisipasi masyarakat	Masih perlu meningkatkan SDM dan kesadaran masyarakat pengguna
Persentase jembatan dalam kondisi mantap	92,02%	14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketersediaan sumber dana	Kondisi Cuaca dan Partisipasi masyarakat	Masih perlu meningkatkan SDM dan kesadaran masyarakat pengguna

<p>Persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik</p>	<p>34,55%</p>	<p>01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>	<p>Ketersediaan sumber dana</p>	<p>Kondisi Cuaca dan Partisipasi masyarakat</p>	<p>Masih perlu meningkatkan SDM dan kesadaran masyarakat</p>
---	---------------	---	---------------------------------	---	--

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Persentase pengembangan pengendalian banjir	24,15 %	01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketersediaan sumber dana	Partisipasi masyarakat	Masih perlu meningkatkan SDM, kesadaran masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait
Persentase bangunan/Gedung public yang termanfaatkan	94,35 %	01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketersediaan sumber dana	Kondisi Cuaca dan Partisipasi masyarakat	Masih perlu meningkatkan SDM dan kesadaran masyarakat
Persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang	42,00%	01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketersediaan sumber dana	Partisipasi masyarakat	Masih perlu meningkatkan SDM dan kesadaran masyarakat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Persentase Kawasan pemukiman yang layak	94,38%	29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketersediaan sumber dana	Partisipasi masyarakat	Masih perlu meningkatkan SDM dan kesadaran masyarakat
Persentase rumah layak huni	97,14%	29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketersediaan sumber dana	Partisipasi masyarakat	Masih perlu meningkatkan SDM dan kesadaran masyarakat
Persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak	100 %	01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketersediaan sumber dana	Partisipasi masyarakat	Masih perlu meningkatkan SDM dan kesadaran masyarakat

### **1.3 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
2. Belum optimalnya penataan wajah kota
3. Belum optimalnya penegakan tata ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Rendahnya pembangunan dan peningkatan kualitas saluran pengairan dan irigasi.
5. Belum terpenuhinya bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar kebutuhan.
6. Rendahnya akses sanitasi aman.
7. Akses terhadap air bersih masih dibawah 80%.
8. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh.
9. Belum terpenuhinya PSU Perumahan.
10. Masih terdapat rumah tidak layak huni.

### **1.4 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan mencakup:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum, Penataran Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2024 ini terdiri dari 4 (empat) bagian sesuai dengan PermenPAN RB No 53 tahun 2014, yaitu:

- BAB I Pendahuluan mencakup: Penjelasan umum organisasi, aspek strategis organisasi serta permasalahan yang sedang dihadapi.
- BAB II Perencanaan Kinerja mencakup: Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja tahun 2024.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja mencakup: Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.
- BAB IV Penutup mencakup: Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah-langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis merupakan perencanaan jangka menengah pertama dari rencana jangka panjang yaitu Rencana Strategis. Oleh karena itu, penetapan visinya harus mengacu pada tahapan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Mengingat beberapa kondisi dan pemikiran tersebut, maka komitmen dan kesepakatan unsur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan harus tetap berada dalam koridor tahapan rencana Renstrada. Renstrada menetapkan pada tahun 2024 adalah tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-1 RPJMD Kabupaten Balangan, yakni : **“Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan”**.

Dalam rangka pencapaian misi tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan yakni meningkatnya infrastruktur wilayah perdesaan dan perkotaan, dengan sasaran pembangunan yaitu: meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik dan meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman.

Maksud ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan adalah memberikan arah dan pedoman bagi aparatur dinas dalam proses suatu kegiatan yang berorientasi pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program. Sebagai suatu instrumen kebijakan, rencana strategis memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan karena akan memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan kinerja dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan serta untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam jangka 1 (satu) Tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD, disajikan dalam tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**SKPD**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
	<b>Tujuan Perangkat Daerah :</b> Meningkatnya infrastruktur public dan perumahan permukiman		<b>Indikator tujuan perangkat daerah :</b> Indeks infrastruktur urusan ke PUPR	30,52	32,79	33,76	36,05	38,00
			<b>Indikator sasaran perangkat daerah :</b>					
		Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	55,48	66,07	58,47	63,47	68,47
			Persentase jembatan dalam kondisi mantap	78,42	80,06	89,02	92,02	95,02
		Meningkatnya kualitas pengendali banjir dan irigasi	Persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik	23,09	24,20	31,57	34,55	39,24
			Persentase pengembangan pengendalian banjir	11,79	12,41	14,68	20,68	22,68
		Meningkatnya pemanfaatan bangunan/Gedung publik	Persentase bangunan/Gedung public yang termanfaatkan	89,38	89,49	89,60	94	95
		Meningkatnya kualitas pengaturan dan pembinaan tata ruang	Persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penatan ruang	14	20	34,50	42	52
		Meningkatnya kualitas hasil konstruksi	Persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak	100	100	100	100	100
			<b>Indikator tujuan perangkat daerah :</b> Indeks infrastruktur urusan perumahan	22,32	22,85	23,82	24,32	24,75
			<b>Indikator sasaran perangkat daerah :</b>					
		Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Kawasan pemukiman yang layak	74,08	78,49	84,78	91,71	98
			Persentase rumah layak huni	90,28	95	95	96	96

## **2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ruang Kabupaten Balangan Tahun 2021. Hal ini telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan No 008 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2024 :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat**  
**dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan**  
**Tahun 2024**

No	Kinerja Utama Eselon II	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan indikator dan Cara perhitungan indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	<p><b>Makna Indikator</b> : jalan dalam kondisi mantap bermakna bisa dilalui kendaraan roda empat dan dua dengan indikator tersebut kita dapat mengukur tingkat pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah (berupa jalan) yang secara kuantitas dan kualitas</p> <p><b>Alasan Pemilihan</b> : Dengan terpenuhinya infrastruktur wilayah yang baik tersebut secara kuantitas maupun kualitas diharapkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan.</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : Panjang Kondisi jalan mantap (baik+sedang) / Panjang jalan Kabupaten X 100%</p>	Kepala Dinas	Bidang BM
		Persentase jembatan dalam kondisi mantap	<p><b>Makna Indikator</b> : jembatan dalam kondisi mantap bermakna bisa dilalui kendaraan roda empat dan dua dengan indikator tersebut kita dapat mengukur tingkat pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah (berupa jalan) yang secara kuantitas dan kualitas</p> <p><b>Alasan Pemilihan</b> : Dengan terpenuhinya infrastruktur wilayah yang baik tersebut secara kuantitas maupun kualitas diharapkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jembatan</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : Panjang jembatan kondisi baik / panjang jembatan di Kabupaten Balangan X 100%</p>		
2	Meningkatnya kualitas pengendali banjir dan irigasi	Persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik	<p><b>Makna Indikator</b> : Persentase ini menunjukkan luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik untuk mendukung ketahanan pangan.</p> <p><b>Alasan Pemilihan</b> : Indikator ini dapat menunjukkan persentase luas pertanian kewenangan Kabupaten/Kota yang terlayani irigasi dengan baik</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : Luas pertanian yang terlayani irigasi dalam kondisi baik / total luas pertanian yang terlayani irigasi kewenangan daerah X 100%</p>	Kepala Dinas	Bidang SDA
		Persentase pengembangan pengendalian banjir	<p><b>Makna Indikator</b> : Persentase ini menunjukkan panjang perkuatan tebing yang ditangani untuk pengendali banjir</p> <p><b>Alasan Pemilihan</b> : Indikator ini dapat menunjukkan persentase pengendali banjir yang ditangani di wilayah Kabupaten/kota</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : Panjang tebing sungai yang ditangani / total panjang tebing sungai yang rawan banjir X 100%</p>		
3	Meningkatnya pemanfaatan bangunan/Gedung publik	Persentase bangunan/Gedung public yang termanfaatkan	<p><b>Makna Indikator</b> : Persentase ini menunjukkan jumlah bangunan/gedung publik yang dimanfaatkan dibandingkan dengan kebutuhan bangunan/gedung publik yang ada di suatu wilayah</p> <p><b>Alasan Pemilihan</b> : Untuk meningkatkan pelayanan publik perlu bangunan yang berkualitas</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : Jumlah bangunan/gedung public yang dimanfaatkan / total bangunan /gedung public X 100%</p>	Kepala Dinas	Bidang Cipta Karya
4	Meningkatnya kualitas pengaturan dan pembinaan tata ruang	Persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang	<p><b>Makna Indikator</b> : Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten yang ditinjau dari 3 aspek (pengaturan, pembinaan, pelaksanaan) semakin meningkat digambarkan oleh nilai kumulatif dari penilaian masing-masing</p> <p><b>Alasan Pemilihan</b> : Mengimplementasikan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : Jumlah dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang yang disusun/ jumlah total kebutuhan dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang Kabupaten Balangan X 100%</p>	Kepala Dinas	Bidang Penataan Ruang
5	Meningkatnya kualitas hasil konstruksi	Persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak	<p><b>Makna Indikator</b> : Persentase ini menunjukkan bahwa semua pekerjaan yang ada harus sesuai dengan kontrak yang telah di perjanjikan</p> <p><b>Alasan Pemilihan</b> : Mengimplementasikan PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : Jumlah hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak / jumlah hasil konstruksi yang dilaksanakan X 100%</p>	Kepala Dinas	Bidang Jaskon
6	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Kawasan pemukiman yang layak	<p><b>Makna Indikator</b> : Persentase ini menunjukkan luas permukiman yang layak baik dari segi sanitasi, air minum maupun bangunannya.</p> <p><b>Alasan Pemilihan</b> : Mengimplementasikan PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : Luas permukiman yang layak dikawasan kumuh / Luas permukiman dikawasan kumuh kabupaten Balangan X 100%</p>	Kepala Dinas	Bidang Cipta Karya dan Bidang Perkim
		Persentase rumah layak huni	<p><b>Makna Indikator</b> : Persentase ini menunjukkan jumlah rumah layak huni yang ada di suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu</p> <p><b>Alasan Pemilihan</b> : 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : Jumlah rumah layak huni / Total jumlah rumah Kabupaten Balangan X 100%</p>		Bidang Perkim

## 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Adapun yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan kegiatan dan program pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

### **Perjanjian Kinerja Dinas PUPRPERKIM**

LAMPIRAN: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN

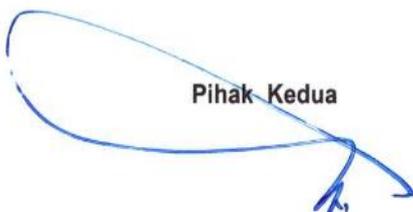
#### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

#### **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatnya Kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	63,47%
		Persentase jembatan dalam kondisi mantap	92,02%
2	Meningkatnya kualitas pengendali banjir dan irigasi	Persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik	34,55%
		Persentase pengembangan pengendalian banjir	20,68%
3	Meningkatnya pemanfaatan bangunan/Gedung publik	Persentase bangunan/Gedung public yang termanfaatkan	94%
4	Meningkatnya kualitas pengaturan dan pembinaan tata ruang	Persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang	42%
5	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Kawasan permukiman yang layak	91,71
		Persentase rumah layak huni	96%
6	Meningkatnya kualitas hasil konstruksi	Persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 19.241.715.396,-	APBD
2.	Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 65.016.307.750,-	APBD
3.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 14.029.150.000,-	APBD
4.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 21.833.592.000,-	APBD
5.	Penataan Bangunan Gedung	Rp. 172.417.586.000,-	APBD
6.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 72.512.744.105,-	APBD
7.	Penyelenggaraan Jalan	Rp. 242.786.803.600,-	APBD
8.	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 5.113.793.000,-	APBD
9.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 2.031.062.600,-	APBD
10.	Pengembangan Perumahan	Rp. 1.664.990.600,-	APBD
11.	Kawasan Permukiman	Rp. 5.383.418.500,-	APBD
12.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 23.817.058.200,-	APBD
13.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 146.640.251.340,-	APBD

Pihak Kedua



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Pangreh, Januari 2024

Pihak Pertama,



RAHMADIAH.MT

NIP 19760309 200604 2 007

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan Tahun 2024

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan merupakan salah satu perangkat daerah yang menunjang pencapaian misi I RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026, yaitu meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.

Adapun capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan berdasarkan hasil pengukuran kinerja disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**

#### Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PUPRPERKIM Tahun 2024

Sasaran Strategis I				
Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	63,47%	65,19%	102,71%
2	Persentase jembatan dalam kondisi mantap	92,02%	92,02%	100,00%
Sasaran Strategis II				
Meningkatnya Kualitas pengendali banjir dan irigasi				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik	34,55%	34,55%	100,00%
2	Persentase pengembangan pengendalian banjir	20,68%	24,15%	116,78%
Sasaran Strategis III				
Meningkatnya pemanfaatan bangunan/gedung publik				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase bangunan/gedung publik yang termanfaatkan	94,00%	94,35%	100,37%
Sasaran Strategis IV				
Meningkatnya Kualitas Pengaturan dan pembinaan tata ruang				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang	42,00%	42,00%	100,00%

Sasaran Strategis V				
Meningkatnya kualitas hasil konstruksi				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak	100,00%	100,00%	100,00%
Sasaran Strategis VI				
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase kawasan permukiman yang layak	91,71%	94,38%	102,91%
2	Persentase Rumah layak huni	96,00%	97,14%	101,19%

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 9 indikator kinerja utama telah mencapai target yang telah ditetapkan bahkan ada yang melewati target yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan kinerja Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan tahun 2024 Sangat Memuaskan.

### 3.2 Analisa Capaian Kinerja

Sasaran Strategis I :		
Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan		
Indikator Kinerja	1	Persentase Jalan dalam kondisi mantap
	2	Persentase jembatan dalam kondisi mantap
Indikator Kinerja	1	Persentase Jalan dalam kondisi mantap

- a. Perbandingan realisasi Persentase jalan dalam kondisi mantap dengan target kinerja tahun 2024

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan realisasi persentase jalan dalam kondisi mantap dengan target**  
**Kinerja tahun 2024**

Sasaran Strategis I				
Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	63,47%	65,19%	102,71%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa target kinerja dapat dicapai dengan baik dengan capaian 102,71%. Hal ini karena pelaksanaan program didukung dengan anggaran yang sangat besar sesuai kebutuhan dari APBD maupun dana yang bersumber dari DAK bidang jalan.

Pada tahun 2024, capaian kinerja terkait persentase jalan dalam kondisi mantap telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Program pemeliharaan dan peningkatan jalan terus dioptimalkan untuk mendukung mobilitas dan perekonomian yang lebih baik, serta memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Persentase jalan yang mencapai kondisi mantap adalah salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja pembangunan infrastruktur transportasi, yang mencerminkan kualitas jalan dan keberlanjutan penggunaannya. Hingga akhir tahun 2024, persentase jalan yang berhasil mencapai kondisi mantap telah mencapai 65,19%, yang menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi mantap ini mencakup jalan yang diperbaiki dan dipelihara dengan baik, serta jalan yang baru dibangun yang sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan efektivitas berbagai kebijakan dan program pembangunan infrastruktur jalan yang dijalankan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk mengetahui kondisi jalan di Kabupaten Balangan maka pada tahun 2024 telah dilaksanakan survey kondisi jalan PKRMS (*Provincial/Kabupaten Road Management System*) pada 127 ruas jalan Kabupaten dengan metode SDA (*Surface Distress Index*). Metode survey SDI adalah skala kinerja jalan yang diperoleh dari hasil pengamatan secara visual terhadap kerusakan jalan yang terjadi dilapangan. Faktor-faktor yang menentukan besaran SDI adalah kondisi retak pada permukaan jalan dari total ruas, lebar retak rata-rata jumlah lubang per 100 meter serta kedalaman bekas roda/rutting. Hasil survey tersebut dimasukan kedalam form SDI yang kemudian dari form tersebut nantinya akan dimasukan ke form exel RCS aspal/beton atau kerikil/tanah untuk mengetahui kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Adapun hasil survey secara ringkas rekapitulasinya disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Hasil Survey Kondisi Jalan Kabupaten tahun 2024**

No	Kategori	Panjang jalan	Persentase
1	Baik	275,108	48,51%
2	Sedang	94,547	16,67%
3	Rusak Ringan	16,08	2,84%
4	Rusak Berat	181,341	31,98%
<b>Jumlah</b>		<b>567,076</b>	<b>100%</b>

Dari hasil survey tersebut diatas menunjukkan bahwa kondisi jalan jalan (kategori baik dan sedang) mencapai 369,655 KM. Dengan demikian kondisi jalan mantap jika dibandingkan dengan Panjang jalan Kabupaten maka persentasenya sebagai berikut :

		Kondisi jalan mantap (Baik + Sedang)	
Persentase jalan mantap =		<hr/>	X 100%
		Panjang Jalan Kabupaten	
		369,655	
	=	<hr/>	X 100%
		567,376	

= 65,19%

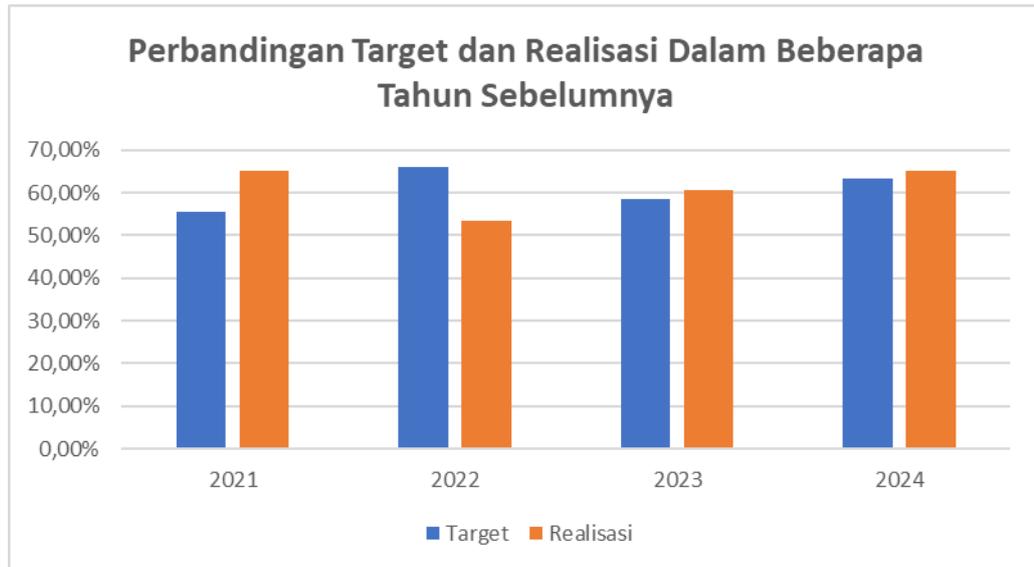
**b. Perbandingan capaian persentase jalan dalam kondisi mantap dalam beberapa tahun sebelumnya**

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja, berikut ini disajikan data perkembangan 4 (empat) tahun terakhir pelaksanaan Renstra yang dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

**3.4**

**Tabel Perbandingan Target dan Realisasi dalam beberapa tahun sebelumnya**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2021	55,48%	65,24%
2022	66,07%	53,47%
2023	58,47%	60,70%
2024	63,47%	65,19%



Perkembangan capaian persentase jalan dalam kondisi mantap 2021 dan 2023 serta 2024 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan karena dipengaruhi oleh total beban kendaraan yang melewati juga diakibatkan adanya perubahan penilaian terhadap kriteria jalan mantap yang dulu agregat baik dianggap mantap sedangkan sekarang jalan dianggap dalam kondisi mantap harus kriteria dengan kondisi aspal baik dan juga diakibatkan karena pada tahun 2022 terjadi bencana banjir di beberapa lokasi Kecamatan yang menyebabkan jalan longsor dan jalan aspal banyak yang rusak karena terendam banjir selain itu juga adanya perbaikan jalan Nasional yang mengakibatkan pengalihan arus jalan.

**c. Perbandingan realisasi kinerja kumulatif tahun ini dengan target akhir Renstra**

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Balangan disusun untuk perencanaan periode 2021-2026, sehingga saat ini merupakan pelaksanaan Renstra tahun ke 4. Adapun capaian realisasi kinerja tahun ini dibandingkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.5**

**Perbandingan realisasi kinerja persentase jalan dalam kondisi mantap tahun 2024 Dengan target akhir Renstra Tahun 2026**

NO	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	65,19%	73,47%	88,73%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa meskipun realisasi kinerja telah mencapai target di tahun 2024, namun jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2026 masih belum mencapai. Namun demikian melihat perkembangan kinerja tiap tahun yang cenderung meningkat maka target akhir Renstra optimis dapat dicapai. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut dengan berusaha mencari sumber anggaran lain melalui usulan DAK ke kementerian PUPR.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten Lain atau standar Nasional**

Persentase jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Tabalong sebesar 78% sedangkan di Kabupaten Balangan baru sebesar 65,19% sehingga kinerja Kabupaten Balangan perlu ditingkatkan lagi, Karena perbandingan antara kabupaten tersebut lumayan jauh perbandingannya.

Indikator yang digunakan oleh Dinas PUPR Provinsi Kalsel adalah tingkat konektivitas jalan provinsi yang berbeda dengan indikator yang di gunakan oleh Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan sehingga tidak bisa di perbandingkan

Indikator yang digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Waktu Tempuh pada Jalan Lintas Utama Pulau sehingga tidak dapat di perbandingkan juga dengan Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan.

**e. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian kinerja utama**

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja persentase jalan dalam kondisi mantap yaitu melalui program penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dengan sub kegiatan sebagai berikut.

- a. Rekonstruksi jalan proses perbaikan jalan yang rusak parah atau tidak lagi dapat dipertahankan dengan pemeliharaan biasa, dengan tujuan untuk mengembalikan atau meningkatkan kondisi jalan agar dapat memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan kapasitas lalu lintas yang diinginkan. Rekonstruksi jalan biasanya dilakukan untuk jalan yang sudah mengalami kerusakan struktural yang signifikan atau yang tidak dapat diperbaiki hanya dengan perawatan rutin. Pada Tahun 2024 panjang jalan yang di tangani pada kegiatan rekonstruksi jalan sebesar 67,42 Km.

**Foto Kegiatan Rekonstruksi jalan**

Pekerjaan : Peningkatan Jalan gunung pandau – haur batu  
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan



**Pekerjaan : Peningkatan Jalan simpang empat muara pitap – simpang empat gunung pandau**  
**Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan**



- b. Rehabilitasi jalan suatu tindakan untuk memperbaiki jalan yang sudah rusak atau aus, tetapi tidak membutuhkan perubahan total seperti pada rekonstruksi. Tujuan rehabilitasi adalah untuk mengembalikan fungsi dan keselamatan jalan dengan memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan hingga sedang yang terjadi pada lapisan permukaan atau struktur jalan, tanpa mengganti seluruh elemen struktur jalan tersebut. Pada Tahun 2024 panjang jalan yang ditangani untuk kegiatan rehabilitasi jalan sebesar 0,15 Km.

**FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN**  
**Pekerjaan : Rehabilitasi jalan depan puskesmas halong**  
**Sub Kegiatan : Rehabilitasi jalan**



- c. Pemeliharaan rutin jalan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk menjaga agar jalan tetap dalam kondisi yang baik dan aman digunakan, dengan tujuan memperpanjang umur jalan dan menghindari kerusakan lebih lanjut. Pemeliharaan rutin biasanya mencakup kegiatan yang relatif sederhana dan tidak memerlukan pembaruan struktur besar, tetapi penting untuk memastikan kelancaran lalu lintas dan mengurangi biaya perbaikan besar di masa depan. Pada Tahun 2024 panjang jalan yang ditangani untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan sebesar 0,3 Km.

**FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN**  
Pekerjaan : Pemeliharaan Rutin Jalan  
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan



- d. Pembangunan jalan adalah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat. Proses ini biasanya melibatkan perencanaan yang matang, mulai dari analisis kebutuhan, studi kelayakan, perancangan desain, hingga tahap pelaksanaan. Selain itu, pembangunan jalan juga memperhatikan faktor lingkungan, keselamatan, dan aksesibilitas. Pada tahun 2024 pembangunan jalan yang ditangani sebesar 2,5 Km

**FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN**  
**Pekerjaan : Pembangunan Jalan Kembar Ruas Paringin-Lampihong**  
**Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan**



**Pekerjaan : Pembangunan Jalan Tugu Maritam - Muara Pitap**  
**Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan**



**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

**Keberhasilan :**

Beberapa upaya nyata yang telah dilakukan untuk mencapai capaian tersebut antara lain:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan Jalan: Pemerintah telah meningkatkan alokasi anggaran untuk program pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jalan, baik yang bersifat peningkatan kapasitas maupun perbaikan struktural.
2. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah: Adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan jalan. Hal ini juga mencakup koordinasi dengan berbagai sektor terkait, termasuk sektor perhubungan dan ekonomi.

**Kegagalan :** Meskipun capaian kinerja tahun 2024 relatif positif, ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian persentase jalan dalam kondisi mantap:

1. Proses Pengadaan yang Lambat: Proses pengadaan barang dan jasa yang terkadang masih lambat atau birokratis menjadi penghambat dalam percepatan proyek pembangunan jalan.
2. Pertumbuhan Kendaraan yang Pesat: Meningkatnya volume kendaraan menyebabkan keausan jalan yang lebih cepat, khususnya di jalan utama. Hal ini menuntut perhatian lebih terhadap perencanaan dan pengelolaan jalan.
3. Faktor Alam dan Cuaca Ekstrem: Beberapa wilayah mengalami cuaca ekstrem seperti hujan deras dan banjir yang menyebabkan kerusakan jalan. Perawatan jalan di daerah dengan kondisi geografis yang sulit juga menghadapi tantangan tersendiri, seperti akses yang terbatas dan biaya yang lebih tinggi.

**Solusi :**

1. Menyederhanakan dan mempercepat tahapan administrasi yang tidak esensial. Hal ini dapat mencakup pengurangan birokrasi yang memperlambat proses pengadaan.
2. Menggunakan standar kontrak yang lebih sederhana dan jelas agar mempermudah pemahaman antara pihak penyedia dan pengguna.
3. Melakukan perencanaan yang lebih detail dan matang terkait dengan kebutuhan barang dan jasa sebelum proses pengadaan dimulai. Hal ini mengurangi ketergantungan pada pengadaan mendesak yang sering kali terhambat oleh proses birokratis.
4. Menggunakan bahan-bahan konstruksi jalan yang lebih tahan terhadap beban berat dan keausan, seperti aspal modifikasi atau beton polimer yang lebih tahan lama dan dapat mengurangi frekuensi perbaikan.
5. Menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap pembatasan beban kendaraan, terutama di jalan-jalan utama yang sering dilalui kendaraan berat.
6. Merancang jalan dengan kapasitas yang sesuai dengan prediksi volume kendaraan di masa depan. Ini dapat mencakup pembangunan jalan dengan lapisan material yang lebih tahan lama dan kuat, serta mempertimbangkan potensi perkembangan kawasan di sekitar jalan.
7. Material Jalan yang Tahan Cuaca: Menggunakan material jalan yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem, seperti aspal modifikasi, beton tahan air, atau material khusus yang dapat menahan perubahan suhu ekstrem atau kelembapan tinggi.

**g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personal dan sumber daya pembiayaan/anggaran.

Bidang Bina Marga saat ini memiliki 9 orang ASN yang menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \frac{(\text{Realisasi biaya} \times 100\%)}{\text{Target Biaya}}$$

Dalam penggunaan anggaran pada tahun 2024 jumlah pagu anggaran pada bidang Bina Marga tahun 2024 untuk persentase jalan dalam kondisi mantap yaitu sebesar Rp.193.482.511.350,00 dan terealisasi sebesar Rp.151.119.999.797,00. Dapat disimpulkan realisasi keuangan ini tidak sampai 100%, dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program yaitu 78,11% dengan persentase capaian IKU 102,71%. Maka dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya biaya.

Pada pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga tahun 2024 realisasi fisik dan keuangan tidak mencapai 100% karena adanya sub kegiatan rekonstruksi jalan yang dilakukan pemutusan kontrak karena pihak ketiga kurang kompeten dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan untuk sub kegiatan pemeliharaan rutin jalan kurang maksimal di laksanakan karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di bidang Bina Marga untuk melakukan pekerjaan secara maksimal serta adanya Proses Pengadaan yang Lama: Proses tender atau pengadaan barang dan jasa untuk proyek konstruksi jalan bisa memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Hal ini dapat menunda pelaksanaan kegiatan dan akhirnya mempengaruhi realisasi anggaran. terjadinya negosiasi harga pada proses pengadaan yang kurang dari nilai pagu anggaran, serta adanya pembelian ATK dan pengadaan makan minum yang tidak terealisasi.

Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan		
Indikator Kinerja	1	Persentase Jalan dalam kondisi mantap
	2	Persentase jembatan dalam kondisi mantap
Indikator Kinerja	2	Persentase jembatan dalam kondisi mantap

Pada tahun 2024, capaian kinerja terkait persentase jembatan dalam kondisi mantap menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagai salah satu elemen vital dalam infrastruktur transportasi, jembatan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran mobilitas barang dan orang, serta mendukung perekonomian di berbagai wilayah. Kondisi jembatan yang

mantap sangat berpengaruh terhadap keselamatan lalu lintas dan efisiensi sistem transportasi secara keseluruhan.

Hingga akhir tahun 2024, persentase jembatan yang berada dalam kondisi mantap mencapai 92,02%, yang mencerminkan peningkatan yang baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi mantap pada jembatan mencakup perbaikan atau pembangunan jembatan baru yang memenuhi standar keselamatan dan kualitas konstruksi. Peningkatan ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam upaya pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan infrastruktur jembatan di seluruh wilayah.

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan khususnya Bidang Bina Marga

**a. Perbandingan realisasi persentase jembatan dalam kondisi mantap dengan target tahun pengukuran**

**Tabel 3.8**

**Perbandingan realisasi persentase jembatan dalam kondisi mantap dengan target Kinerja tahun 2024**

Sasaran Strategis I				
Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase jembatan dalam kondisi mantap	92,02%	92,02%	100,00%

Rumus perhitungan persentase jembatan dalam kondisi mantap

Panjang jembatan dalam kondisi baik / Panjang total jembatan x 100%

$$4.323,56 \text{ meter} / 4.698,31 \text{ meter} \times 100\% = 92,02\%$$

Total Panjang jembatan Kabupaten Balangan pada tahun 2024 sebesar 4.698,31 meter dengan rincian Panjang kondisi jembatan yang mantap 4.323,56 meter, tidak mantap 374,75 meter, sehingga realisasi pencapaian target atas indikator persentase jembatan dalam kondisi mantap tersebut adalah sebesar 92,02% dari target sebesar 92,02%. Hal ini berarti bahwa

capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori capaian **Sangat Memuaskan**.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya**

Perbandingan realisasi persentase jembatan dalam kondisi mantap dengan beberapa tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel dan grafik berikut ini.

**Tabel 3.9**

**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2021	78,42%	85,04%
2022	80,06%	88,02%
2023	89,02%	91,30%
2024	92,02%	92,02%



Pada tabel dan grafik diatas terlihat bahwa perkembangan realisasi persentase jembatan dalam kondisi mantap meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2024 telah tercapai 92,02%, mencapai dari target yang ditetapkan yaitu 92,02%. Untuk mencapai kinerja ini telah banyak di dukung dari pekerjaan Pembangunan jembatan, rehabilitasi jembatan dan pemeliharaan rutin jembatan.

**c. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra**

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan disusun untuk periode 2021-2026, maka pada tahun 2024 merupakan pelaksanaan Renstra Tahun ke empat. Adapun realisasinya dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.10**

**Perbandingan capaian persentase jembatan dalam kondisi mantap tahun 2024 Terhadap target akhir Renstra**

NO	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian
1	Persentase jembatan dalam kondisi mantap	92,02%	98,02%	93,88%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2024 telah mencapai 92,02%. Dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 98,02%, maka capaian kinerja yang terealisasi pada tahun 2024 telah mencapai 93,88%. Dengan memperhatikan perkembangan capaian setiap tahun yang selalu meningkat, maka target pada akhir Renstra optimis akan dicapai dengan rencana aksi untuk melaksanakan Pembangunan jalan, rehabilitasi jalan pada tahun yang akan datang melalui anggaran APBD dan berusaha memperoleh anggaran dari Pusat dan Provinsi.

**d. Perbandingan capaian kinerja persentase jembatan dalam kondisi mantap dengan capaian provinsi Kalsel**

Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Selatan indikator yang digunakan adalah Indeks konektivitas jalan sedangkan indikator yang digunakan oleh Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan adalah persentase jembatan dalam kondisi mantap sehingga indikator yang digunakan tidak dapat diperbandingkan capaian kerjanya.

Indikator kinerja utama yang digunakan oleh Dinas PUPR Provinsi Kalsel adalah Tingkat konektivitas jalan provinsi sedangkan indikator yang digunakan oleh Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan adalah persentase jembatan dalam kondisi mantap sehingga indikator yang

digunakan tidak dapat diperbandingkan capaian kerjanya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau sedangkan indikator yang digunakan oleh Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan adalah persentase jembatan dalam kondisi mantap sehingga indikator yang digunakan tidak dapat diperbandingkan capaian kerjanya.

**e. Program dan kegiatan serta capaian output dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama**

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja persentase jembatan dalam kondisi mantap yaitu melalui kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dengan sub kegiatan sebagai berikut.

1. Pembangunan jembatan merupakan bagian penting dari infrastruktur transportasi yang memungkinkan mobilitas lebih efisien, terutama di daerah yang terpisah oleh sungai, lembah, atau rintangan alam lainnya. Jembatan berfungsi untuk menghubungkan dua titik yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Pada tahun 2024 pembangunan jembatan ada 135 buah yang di bangun.

**FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN**  
Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Kambiyain  
Sub Kegiatan : Pembangunan jembatan



2. Rehabilitasi jembatan adalah proses perbaikan atau pemulihan kondisi jembatan yang sudah ada agar tetap berfungsi dengan baik dan aman. Tujuan utama dari rehabilitasi ini adalah untuk memperpanjang umur jembatan, meningkatkan daya tahan struktur, serta memastikan keselamatan pengguna jalan. Rehabilitasi dilakukan pada jembatan yang telah mengalami kerusakan atau penurunan kinerja, baik karena usia, cuaca, atau beban lalu lintas yang berat. Pada tahun 2024 ada sebanyak 17 buah jembatan yang dilakukan rehabilitasi jembatan.

**FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN**  
Pekerjaan : Rehabilitasi Jembatan Lampihong (Belanda)  
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan



3. Pemeliharaan rutin jembatan adalah aktivitas yang dilakukan secara berkala untuk memastikan jembatan tetap dalam kondisi baik dan aman digunakan sepanjang waktu. Pemeliharaan ini mencakup berbagai tindakan untuk memeriksa, memperbaiki, dan merawat struktur jembatan agar bisa bertahan lama, menghindari

kerusakan lebih lanjut, dan memperpanjang umur jembatan. Pada tahun 2024 ada sebanyak 6 buah jembatan yang dilakukan pemeliharaan rutinnya.

**f. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi yang akan dilakukan**

Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan dalam mencapai kondisi jembatan yang mantap pada tahun 2024 antara lain:

1. Rehabilitasi dan Renovasi Jembatan Lama: Pemerintah telah melakukan rehabilitasi dan renovasi jembatan yang sudah ada, terutama yang usianya lebih dari 20 tahun. Pekerjaan ini bertujuan untuk memperpanjang masa pakai jembatan dan meningkatkan daya dukungnya terhadap beban kendaraan.
2. Pembangunan Jembatan Baru: Pemerintah terus berupaya untuk membangun jembatan baru, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses dan kebutuhan infrastruktur jembatan yang memadai. Proyek ini mencakup pembangunan jembatan penghubung antar wilayah dan antarkabupaten/kota serta antar desa.

Meskipun terdapat kemajuan yang baik, beberapa hambatan masih mempengaruhi pencapaian kondisi jembatan yang mantap, antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran: Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dana yang tersedia untuk rehabilitasi dan pembangunan jembatan. Hal ini menyebabkan adanya proyek jembatan yang tertunda atau tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Proses pengadaan yang Lambat: Dalam beberapa kasus, proses pengadaan barang dan jasa untuk proyek pembangunan dan rehabilitasi jembatan masih berjalan lambat, yang menghambat percepatan pekerjaan di lapangan.
3. Faktor alam dan Bencana Alam: Beberapa daerah rawan bencana alam seperti banjir, tanah longsor yang dapat merusak struktur jembatan. Hal ini menambah tantangan dalam pemeliharaan dan perbaikan jembatan yang berada di wilayah tersebut.

## **Solusi :**

1. **Prioritaskan Proyek yang Paling Mendesak:** Menilai kondisi jembatan yang paling membutuhkan perbaikan atau pembangunan terlebih dahulu. Dengan melakukan analisis risiko dan prioritas, dana yang terbatas bisa digunakan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak terbesar bagi masyarakat.
2. **Optimalisasi Pengelolaan Anggaran:** Pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan dapat membantu mengurangi pemborosan dan memastikan dana yang ada digunakan secara maksimal. Ini termasuk meminimalkan biaya administrasi dan mencari solusi yang lebih hemat biaya dalam pembangunan.
3. **Perencanaan yang Matang:** Memastikan bahwa perencanaan proyek sudah sangat matang sebelum memulai pengadaan barang dan jasa. Ketika dokumen dan spesifikasi sudah lengkap dan jelas, proses pengadaan dapat berjalan lebih cepat karena tidak ada revisi atau perbaikan yang harus dilakukan di tengah jalan.
4. **Pemantauan dan Evaluasi Berkala:** Melakukan evaluasi dan pemantauan yang berkala terhadap progres pengadaan agar dapat segera mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang muncul. Tim pengawasan yang baik bisa membantu mempercepat proses dengan cepat menanggulangi masalah yang ada.
5. **Desain Jembatan yang Tahan Bencana:** Merancang jembatan dengan mempertimbangkan risiko bencana alam, seperti banjir atau tanah longsor. Misalnya, desain jembatan yang lebih kokoh dan mampu menahan tekanan air tinggi atau dampak tanah longsor. Penggunaan material tahan korosi atau teknologi pembangunan yang bisa beradaptasi dengan kondisi alam setempat juga bisa meningkatkan daya tahan.
6. **Analisis Risiko dan Pemilihan Lokasi yang Tepat:** Sebelum membangun atau merehabilitasi jembatan, penting untuk melakukan analisis risiko alam secara mendalam. Pemilihan lokasi yang lebih aman dan jauh dari area yang rentan terhadap bencana, seperti tepi sungai yang rawan banjir atau daerah perbukitan yang rawan longsor, dapat mengurangi potensi kerusakan jembatan.

7. **Pemeliharaan Rutin dan Pengecekan Berkala:** Menerapkan program pemeliharaan dan pengecekan berkala untuk memantau kondisi jembatan, terutama di daerah rawan bencana. Ini bisa mencakup pemeriksaan struktur, fondasi, dan elemen penting lainnya agar segera dapat terdeteksi jika ada kerusakan akibat bencana alam.

**g. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personal dan sumber daya pembiayaan/anggaran. Bidang Bina Marga saat ini memiliki 9 orang ASN yang menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \frac{(\text{Realisasi biaya} \times 100\%)}{\text{Target Biaya}}$$

Dalam penggunaan anggaran pada tahun 2024 jumlah pagu anggaran pada bidang Bina Marga untuk persentase jembatan dalam kondisi mantap yaitu sebesar Rp.55.448.885.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.42.941.801.272,00. Dapat disimpulkan realisasi keuangan ini tidak sampai 100%, dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program yaitu 77,44% dengan persentase capaian kinerja sebesar 84,49%. Maka dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya biaya.

Output dari pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Bidang Bina Marga Tahun 2024 tidak ada mencapai target karena selain keterbatasan sumber daya manusia yang ada di bidang Bina Marga, faktor lain yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja karena adanya paket pekerjaan batal yang dilaksanakan karena proses pengadaan yang lambat sehingga rawan pekerjaan fisik selesai tepat waktu sehingga di ambil Keputusan untuk batal dilaksanakan pada tahun 2024, selain itu juga adanya beberapa paket pekerjaan terpaksa dilakukan pemutusan kontrak karena pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga di lapangan tidak maksimal atau tidak sesuai dengan hasil yang ingin di harapkan. Kemudian juga ada pekerjaan jembatan tidak di laksanakan padahal sudah di anggarkan tetapi proses pengadaan tanahnya lambat sehingga batal di laksanakan mengingat waktu sedikit sehingga di ambil Keputusan untuk batal melaksanakan pekerjaan jembatan kapul tersebut.

Pada pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga tahun 2024 realisasi fisik dan keuangan tidak mencapai 100% karena selain keterbatasan sumber daya manusia yang ada di bidang Bina Marga, faktor lain yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja karena adanya paket pekerjaan batal yang dilaksanakan karena proses pengadaan yang lambat sehingga rawan pekerjaan fisik selesai tepat waktu sehingga di ambil Keputusan untuk batal dilaksanakan pada tahun 2024, selain itu juga adanya beberapa paket pekerjaan terpaksa dilakukan pemutusan kontrak karena pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga di lapangan tidak maksimal atau tidak sesuai dengan hasil yang ingin di harapkan. Kemudian juga ada pekerjaan jembatan tidak di laksanakan padahal sudah di anggarkan tetapi proses pengadaan tanahnya lambat sehingga batal di laksanakan mengingat waktu sedikit sehingga di ambil Keputusan untuk batal dilaksanakan dan pada waktu perubahan anggaran tersebut di pindahkan untuk pekerjaan jalan yang lebih prioritas.

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kualitas pengendali banjir dan irigasi		
Indikator Kinerja	3	Persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik

a. Perbandingan Realisasi dengan target kinerja tahun 2024

Pada tahun 2024, capaian kinerja terkait persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik menunjukkan hasil yang positif meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Irigasi yang baik merupakan faktor kunci dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas pertanian. Dengan adanya irigasi yang memadai, petani dapat mengoptimalkan hasil pertanian mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Hingga akhir tahun 2024, persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik mencapai 34,55%, yang merupakan hasil positif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam menyediakan sistem irigasi yang efisien, terutama untuk sektor pertanian yang mengandalkan pasokan air yang stabil.

**Tabel 3.13**

**Perbandingan Realisasi dengan target Kinerja Persentase Luas Pertanian yang Terlayani Irigasi dengan baik**

Sasaran Strategis II Meningkatnya Kualitas pengendali banjir dan irigasi				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik	34,55%	34,55%	100,00%

Rumus perhitungan persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik :

$$\frac{\text{Luas pertanian yang terlayani irigasi dalam kondisi baik}}{\text{total luas pertanian yang terlayani irigasi kewenangan daerah}} \times 100\%$$

$$2.153,62 \text{ ha} / 6.234 \text{ ha} \times 100\% = 34,55\%$$

Pada tahun 2024 kegiatan yang dilakukan adalah Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan adapun daerah irigasi yang dilakukan ada pada DI Paran, DI Paringin, DI Mantimin, DI Pinuan, dan DI Baruh Panyambaran, DI Banyu HIRANG Kaladan, DI Bungin Halubau Utara, DI Bungur Riwa, DI Lokhamawang Sungai Tajun. Pada Tahun 2023 kondisi luas jaringan daerah irigasi dalam kondisi baik sebesar 2.074,50 ha sedangkan total luas irigasi kewenangan daerah sebesar 6.234 ha sehingga diperoleh perhitungan persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan sebesar 34,55%. Adapun target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 34,55 % sedangkan realisasi 34,55% artinya capaian untuk persentase ini adalah 100,00% artinya capaian kinerja dapat dikategorikan **Sangat Memuaskan**.

**b. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan realiasi kinerja beberapa tahun sebelumnya**

Perbandingan realisasi persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik dengan beberapa tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel dan grafik berikut ini.

**Tabel 3.14**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja beberapa tahun Sebelumnya**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2021	23,09%	23,43%
2022	24,20%	30,43%
2023	31,57%	33,28%
2024	34,55%	34,55%



Perkembangan realisasi persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik 2021 sampai 2024 mengalami peningkatan hal ini karena adanya dukungan anggaran dari pemerintah Kabupaten yang ingin meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sehingga akan berdampak pada pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi yang terjadi.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan target Akhir Renstra**

Renstra Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan disusun untuk perencanaan periode 2021-2026, sehingga saat ini merupakan pelaksanaan Renstra tahun ke-4. Adapun capaian realisasi kinerja tahun ini dibandingkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Target akhir Renstra Tahun 2026**

NO	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian
1	Persentase Luas Pertanian yang terlayani irigasi dengan baik	34,55%	44,39%	77,83%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa meskipun realisasi kinerja telah mencapai target tahun 2024, namun jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 masih belum mencapai. Namun demikian melihat perkembangan kinerja tiap tahun yang cenderung meningkat maka target akhir Renstra optimis dapat dicapai. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan untuk mecapai target tersebut dengan berusaha mencari sumber anggaran lain melalui usulan DAK ke Kementerian PUPR.

**d. Perbandingan realisasi kinerja Kabupaten Balangan dengan Kabupaten HSS dan Provinsi Kalsel Serta Kementerian**

Rumusan indikator kinerja Dinas PUPR Kabupaten HSS dan Dinas PUPR Provinsi Kalsel berbeda dengan rumusan indikator kinerja pada Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan namun memiliki kesamaan objek yaitu luas irigasi. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan capaian kinerja Dinas PUPRPERKIM**  
**Kabupaten Balangan dengan Dinas PUPR Kabupaten HSS**  
**dan Dinas PUPR Provinsi Kalsel**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Kabupaten Balangan</b>				
1	Persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik	34,55%	34,55%	100,00%
<b>Kabupaten Hulu Sungai Selatan</b>				
2	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	71,43%	71,43%	100,00%
<b>Provinsi Kalsel</b>				
3	Persentase luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	49,87%	49,87%	100,00%

Pada tabel diatas diketahui bahwa capaian indikator kinerja pada Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan, Dinas PUPR Kabupaten HSS dan Dinas PUPR Provinsi Kalsel sama-sama mencapai target yang telah ditetapkan.

Indikator yang digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi sehingga tidak dapat di perbandingkan juga dengan Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan.

**e. Program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian kinerja utama**

Penunjang tercapainya indikator persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik dengan capaian realisasi sebesar 34,55%, yaitu dengan terealisasinya beberapa pekerjaan konstruksi pada bidang sumber daya air. Adapun rincian penjelasan dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.17**  
**Program/Kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian Kinerja**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	34,55%	34,55%	100,00%
1	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	34,55%	34,55%	100,00%
1	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	4,5 Km	4,5 Km	100,00%
2	Sub Kegiatan Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	1 Km	1 Km	100,00%

**f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja**

Salah satu sumber daya yang dibutuhkan dalam mencapai kinerja yaitu ketersediaan anggaran. Adapun anggaran yang telah digunakan dan direalisasikan, sebagai berikut :

**Tabel 3.18**

**Realisasi anggaran pogram pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			RP	RP	%	
	Pengelolaan Sumber daya air (SDA)	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik				
1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	11.349.090.000	10.856.522.991	95,66	100,00%
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	7.784.810.000	7.512.475.450	96,50	100,00%
<b>Jumlah</b>			<b>19.133.900.000</b>	<b>18.368.998.441</b>	<b>96,00</b>	<b>100,00%</b>

Pada pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air tahun 2024 realisasi fisik dan keuangan tidak mencapai 100% karena terjadinya negosiasi harga pada proses pengadaan yang kurang dari nilai pagu anggaran, serta adanya kegiatan mengalami adendum minus akibat lokasi pekerjaan tergenang air karena intensitas hujan yang tinggi

**g. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif Solusi yang akan dilakukan**

**Keberhasilan :**

Berikut adalah beberapa upaya nyata yang telah dilakukan untuk mencapai kondisi irigasi yang baik pada sektor pertanian:

1. Pembangunan Infrastruktur Irigasi Baru: Pemerintah terus membangun dan memperbaiki jaringan irigasi di berbagai daerah pertanian, baik untuk irigasi teknis, setengah teknis, maupun irigasi sederhana. Pembangunan ini bertujuan untuk memperluas cakupan wilayah yang mendapat layanan irigasi yang baik, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya belum terjangkau sistem irigasi

yang memadai.

2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi yang Ada: Pemerintah juga fokus pada rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah ada. Banyak jaringan irigasi yang sudah tua dan membutuhkan perbaikan agar tetap dapat berfungsi dengan baik. Pekerjaan pemeliharaan secara rutin, seperti pembersihan saluran, perbaikan bendungan, dan pengecekan sistem, dilakukan untuk menghindari kerusakan yang lebih parah.
3. Pelatihan dan Pendampingan kepada Petani: Pelatihan terkait penggunaan irigasi yang efisien dan pemeliharaan sistem irigasi diberikan kepada petani dan kelompok tani di berbagai daerah. Selain itu, program pendampingan kepada petani untuk mengelola sumber daya air secara berkelanjutan juga digalakkan.

**Kegagalan :**

Meskipun capaian kinerja tahun 2024 relatif positif, ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik:

1. Keterbatasan Infrastruktur : Banyak daerah pertanian yang belum memiliki infrastruktur irigasi yang memadai, atau jika ada, kondisi infrastruktur tersebut sudah tua dan tidak efisien.
2. Perubahan Iklim : Perubahan pola curah hujan dan kekeringan yang lebih sering dapat mengganggu ketersediaan sumber air untuk irigasi. Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pasokan air yang diperlukan untuk pertanian.
3. Perubahan Penggunaan Lahan : Alih fungsi lahan pertanian menjadi area non-pertanian (seperti kawasan pemukiman atau industri) dapat mengurangi luas lahan yang terlayani oleh sistem irigasi yang ada.

### **Solusi :**

1. Perbaikan dan Pemeliharaan Infrastruktur yang Ada : Meningkatkan pemeliharaan rutin untuk infrastruktur yang sudah ada, seperti saluran irigasi, bendungan, dan pompa, agar berfungsi dengan optimal. Ini mencakup pengecekan berkala untuk mencegah kerusakan dan pemborosan air.
2. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat : Melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur irigasi. Model kemitraan publik-swasta (PPP) dapat mempercepat pembangunan dan perbaikan sistem irigasi, serta memastikan keberlanjutan pengelolaannya.
3. Penyuluhan dan Pendidikan kepada Petani : Memberikan pendidikan kepada petani mengenai teknik pertanian yang ramah iklim, serta pentingnya pengelolaan air yang efisien. Ini akan membantu mereka lebih siap menghadapi perubahan iklim dan mengurangi kerugian akibat kekurangan air.
4. Perencanaan Tanaman yang Fleksibel : Menyesuaikan waktu tanam dan jenis tanaman dengan pola curah hujan yang berubah, serta mengatur penggunaan air irigasi secara lebih fleksibel sesuai dengan kondisi cuaca yang ada. Ini juga bisa mencakup rotasi tanaman yang lebih tepat agar tidak terlalu bergantung pada irigasi saat curah hujan rendah.
5. Penegakan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian : Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang melarang atau membatasi alih fungsi lahan pertanian yang subur menjadi area non-pertanian. Misalnya, dengan menetapkan zona pertanian yang dilindungi atau kawasan konservasi pertanian yang tidak dapat dialihkan untuk kepentingan lain tanpa izin khusus.

6. Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Lahan : Menerapkan teknik pertanian yang lebih efisien, seperti intensifikasi pertanian, untuk meningkatkan hasil pertanian meskipun luas lahan terbatas. Misalnya, dengan menggunakan sistem irigasi yang efisien, rotasi tanaman, dan teknologi pertanian lainnya yang dapat meningkatkan hasil tanpa perlu memperluas lahan pertanian.

**Foto-Foto Kegiatan yang dilaksanakan Bidang SDA dalam pencapaian Target Kinerja Tahun 2024**



Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kualitas pengendali banjir dan irigasi		
Indikator Kinerja	4	Persentase pengembangan pengendalian banjir

Pada tahun 2024, capaian kinerja terkait pengembangan pengendalian banjir menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya mitigasi risiko banjir di berbagai wilayah, terutama di daerah - daerah rawan banjir. Pengendalian banjir yang efektif tidak hanya melibatkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga sistem manajemen berbasis data dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program tersebut. Hingga akhir tahun 2024, capaian persentase pengembangan pengendalian banjir telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berbagai program pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, seperti normalisasi sungai, pembangunan perkuatan tebing, Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, dan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya telah dilaksanakan dengan baik di sejumlah wilayah prioritas. Capaian ini tercermin pada berkurangnya jumlah kejadian banjir besar yang menyebabkan kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur.

- a. **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target yang ditetapkan**  
 Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan khususnya bidang sumber daya Air dapat di lihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.18**

**Perbandingan Realisasi dengan target Kinerja Persentase Pengembangan pengendalian banjir**

Sasaran Strategis II Meningkatnya Kualitas pengendali banjir dan irigasi				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
4	Persentase pengembangan pengendalian banjir	20,68%	24,15%	116,78%

Rumus perhitungan Persentase pengembangan pengendalian banjir

Panjang tebing sungai yang ditangani / total panjang tebing sungai yang rawan banjir X 100%

$$29.117,08 \text{ meter} / 120.554 \text{ meter} \times 100\% = 24,15\%$$

Pada tahun 2024 panjang tebing sungai yang ditangani telah berjumlah 29.117,08 meter sedangkan total panjang tebing sungai yang rawan banjir sebesar 120.554 meter sehingga di peroleh perhitungan persentase pengembangan pengendalian banjir sebesar 24,15%. Adapun Target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 20,68% sehingga capaian untuk persentase pengembangan pengendalian banjir sebesar 116,78% sehingga dapat dikategorikan capaian kinerja **Sangat Memuaskan**

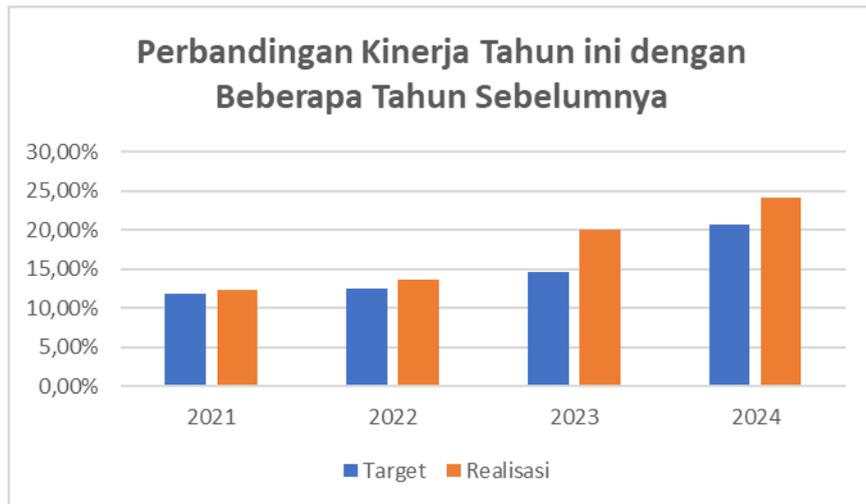
**b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya**

Perbandingan realisasi persentase pengembangan pengendalian banjir dengan beberapa tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel dan grafik berikut ini :

**Tabel 3.19**

**Perbandingan Kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2021	11,79%	12,35%
2022	12,41%	13,68%
2023	14,68%	19,98%
2024	20,68%	24,15%



Pada tabel dan grafik diatas terlihat bahwa perkembangan realisasi persentasi pengembangan pengendalian banjir cenderung meningkat setiap tahun hal ini karena adanya dukungan dana yang tersedia dan adanya koordinasi antar SKPD yang terkait berjalan dengan baik.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra Tahun 2026**

Renstra Dinas PUPRPERKIM disusun untuk periode 2021-2026, maka tahun 2024 merupakan pelaksanaan Renstra tahun empat. Adapun realisasinya dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.20**  
**Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target akhir Renstra Tahun 2026**

NO	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian
1	Persentase pengembangan pengendalian banjir	24,15%	25,68%	94,04%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2024 telah mencapai 24,15%. Dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 (25,68%), maka capaian kinerja yang terealisasi pada tahun 2024 telah mencapai 94,04%. Dengan memperhatikan perkembangan

capaian setiap tahun yang selalu meningkat, maka target pada akhir Renstra optimis akan dicapai dengan rencana aksi untuk melaksanakan Pembangunan dan rehabilitasi bangunan pengendali banjir di Kabupaten Balangan.

**d. Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Balangan dengan Kabupaten HSS dan Provinsi Kalsel dan Kementerian PUPR**

Pada Dinas PUPR Kabupaten HSS dan Dinas PUPR Provinsi Kalsel tidak ada kinerja atau sasarnya berhubungan dengan pengendali banjir sehingga tidak dapat diperbandingkan sedangkan rumusan indikator yang digunakan oleh Kementerian PUPR adalah Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah Sungai kewenangan pusat sedangkan rumusan indikator yang digunakan oleh Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan adalah persentase pengembangan pengendalian banjir sehingga tidak dapat diperbandingkan.

**e. Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan menunjang pencapaian kinerja**

Penunjang tercapainya indikator persentase pengembangan pengendalian banjir dengan capaian realisasi sebesar 24,15%, yaitu dengan terealisasinya beberapa pekerjaan konstruksi pada bidang sumber daya air. Adapun rincian penjelasan dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.21**  
**Program/kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan menunjang pencapaian kinerja**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	34,55%	34,55%	100,00%
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tebing rusak	8,79%	5,00%	143,12%
1	Sub Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun	5 Unit	5 Unit	100,00%
2	Sub Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	4 Km	4 Km	100,00%
3	Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	4	4	100,00%
4	Sub Kegiatan Normalisasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	35 Km	35 Km	100,00%
5	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	47 Lembaga	47 Lembaga	100,00%

**f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja**

Salah satu sumber daya yang dibutuhkan dalam mencapai kinerja yaitu ketersediaan anggaran. Adapun anggaran yang telah digunakan dan direalisasikan, sebagai berikut :

**Tabel 3.22**  
**Realisasi anggaran pogram pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**  
**Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			RP	RP	%	
	Pengelolaan Sumber daya air (SDA)	Persentase tebing rusak				
1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	35.797.937.440	35.470.418.201	99,09	100,00%
2	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	11.114.090.000	10.796.222.000	97,14	100,00%
3	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	umlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	469.260.310	411.278.500	87,64	100,00%
4	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1.154.770.000	1.149.890.000	99,58	100,00%
5	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	2.178.930.000	2.160.666.000	99,16	100%
<b>Jumlah</b>			<b>50.714.987.750</b>	<b>49.988.474.701</b>	<b>98,57</b>	<b>100,00%</b>

Pada pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air tahun 2024 realisasi fisik dan keuangan tidak mencapai 100% karena terjadinya negosiasi harga pada proses pengadaan yang kurang dari nilai pagu anggaran, serta adanya pembelian ATK dan pengadaan makan minum yang tidak terealisasi.

**g. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif Solusi yang akan dilaksanakan**

**Keberhasilan :**

Beberapa upaya nyata yang telah dilakukan untuk pengembangan pengendalian banjir pada tahun 2024 antara lain:

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pengendalian Banjir : Pemerintah telah membangun dan memperbaiki infrastruktur pengendalian banjir, seperti pembangunan perkuatan tebing serta normalisasi sungai di daerah-daerah yang rentan terhadap banjir. Salah satunya adalah pembangunan tanggul penahan banjir di

daerah rawan.

2. Pembangunan Waduk dan Embung Penampung Air: : Sebagai bagian dari upaya untuk mengatur aliran air dan mengurangi potensi banjir, pemerintah melanjutkan pembangunan embung, dan danau retensi di daerah-daerah strategis. embung ini berfungsi sebagai penampung air hujan yang berlebih, untuk mencegah meluapnya sungai yang dapat menyebabkan banjir.

**Kegagalan :**

Meskipun terdapat kemajuan yang menggembirakan, beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengembangan pengendalian banjir antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran: Pengembangan infrastruktur pengendalian banjir memerlukan anggaran yang besar. Keterbatasan dana, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, sering menjadi kendala dalam menyelesaikan proyek-proyek pengendalian banjir yang direncanakan.
2. Perubahan Iklim: Perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan ekstrem dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrem, seperti banjir bandang, memperburuk tantangan pengendalian banjir. Hal ini memerlukan perencanaan yang lebih cermat dan adaptasi terhadap kondisi iklim yang semakin tidak menentu.
3. Keterbatasan Teknologi dan Data: Meskipun teknologi pengendalian banjir mulai berkembang, masih ada beberapa daerah yang belum memiliki sistem pemantauan atau data yang memadai untuk merencanakan dan mengelola potensi banjir dengan efektif. Keterbatasan akses ke teknologi modern dan sistem informasi juga menghambat pengambilan keputusan yang tepat waktu.

**Solusi :**

1. Pengelolaan Anggaran yang Lebih Efisien : Dengan melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran yang ada, pemerintah dapat memastikan bahwa dana yang terbatas digunakan secara lebih efektif. Misalnya, memprioritaskan daerah yang paling rentan terhadap banjir untuk mendapatkan perhatian lebih dulu dan merencanakan proyek secara bertahap.

2. Optimalisasi Penggunaan Infrastruktur yang Ada : Pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang sudah ada sering kali lebih murah daripada membangun yang baru. Fokus pada perbaikan dan perawatan fasilitas yang ada dapat memperpanjang umur infrastruktur pengendalian banjir yang sudah ada dan mencegah kerugian lebih besar.
3. Perencanaan Infrastruktur yang Fleksibel dan Adaptif : Infrastruktur pengendalian banjir harus dirancang dengan mempertimbangkan ketidakpastian perubahan iklim. Hal ini bisa mencakup pembangunan waduk, kanal, dan sistem drainase yang dapat menyesuaikan kapasitasnya dengan peningkatan curah hujan. Selain itu, infrastruktur seperti bendungan dan tanggul dapat didesain untuk menahan intensitas hujan yang lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya.
4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) : Meningkatkan kapasitas dan keterampilan teknis petugas di lapangan, seperti operator stasiun pemantauan atau analis data, sangat penting. Program pelatihan dalam penggunaan teknologi pengendalian banjir dan sistem informasi geografis (GIS) dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik.

**Foto-Foto Kegiatan yang dilaksanakan Bidang SDA dalam pencapaian Target Kinerja Tahun 2024**





Sasaran Strategis III :		
Meningkatnya pemanfaatan bangunan/gedung publik		
Indikator Kinerja	5	Persentase bangunan/gedung publik yang termanfaatkan

Pada tahun 2024, capaian kinerja terkait persentase bangunan/gedung publik yang termanfaatkan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan pemanfaatan bangunan dan gedung publik guna mendukung berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, serta pelayanan publik lainnya. Pemanfaatan yang optimal dari bangunan/gedung publik ini diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hingga akhir tahun 2024, persentase bangunan/gedung publik yang termanfaatkan dengan baik telah mencapai 94,35%. Capaian ini menunjukkan bahwa semakin banyak gedung publik yang tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga dikelola dengan efisien dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Banyak gedung publik yang sebelumnya tidak dimanfaatkan sepenuhnya kini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif, seperti pusat pelayanan masyarakat, gedung pendidikan, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya.

Untuk memberikan kepuasan pelayanan Masyarakat, salah satunya yaitu perlu adanya ketersediaan, sarana dan prasarana public yang dapat di manfaatkan.

Di dalam RPJMD Kabupaten Balangan, hal ini termuat pada misi I dengan sasaran strategis yaitu Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman, Dimana salah satu indikator kinerja pengukuran keberhasilannya yaitu persentase bangunan/Gedung public yang

termanfaatkan. Yang dimaksud disini adalah bangunan Gedung/public yang dapat dimanfaatkan untuk kepuasan pelayanan kepada Masyarakat dengan target di tahun 2024 sebesar 94,00%. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan merupakan perangkat daerah sebagai penanggung jawab untuk mencapai kinerja tersebut sesuai dengan tugas pokoknya. Maka indikator kinerja ini juga menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam Renstra Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.

### **1. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja yang telah ditetapkan**

Sampai dengan pelaksanaan tahun sudah terbangun 248 bangunan strategis yang bisa dimanfaatkan sebanyak 234 buah untuk pelayanan Masyarakat, dan pada tahun 2024 ditargetkan akan dilakukan Pembangunan Gedung/bangunan publik sebanyak 5 buah bangunan yang cukup strategis yaitu :

- a. Pembangunan aula kantor Kesbangpol Kabupaten Balangan
- b. Pembangunan mess pegawai Kejaksaan Negeri Balangan
- c. Pembuatan site development Gudang KPU Kabupaten Balangan
- d. Penambahan ruang kerja kantor DPLH Kabupaten Balangan
- e. Pembangunan wisma Kabupaten Balangan

Dengan demikian sampai dengan pelaksanaan Renstra tahun keempat pada tahun 2024 ini, telah dilakukan pembangunan sehingga sebanyak 234 bangunan public yang dapat dimanfaatkan. Sesuai rumus perhitungannya

$$\text{Jumlah bangunan/gedung publik yang dimanfaatkan / total bangunan /gedung publik X 100\%}$$

$$234 \text{ buah} / 248 \text{ buah} \times 100\% = 94,35\%$$

Capaian realisasi dengan target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.22**

**Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Target yang ditetapkan**

Sasaran Strategis III Meningkatnya pemanfaatan bangunan/gedung publik				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase bangunan/gedung publik yang termanfaatkan	94,00%	94,35%	100,37%

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa bangunan/Gedung public yang bisa dimanfaatkan telah tercapai.

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja beberapa tahun yang lalu**

Pemanfaatan bangunan/Gedung public selalu ada pada sasaran strategis 2021-2026, demikian juga halnya pada RPJMD periode 2021-2026, namun dengan jumlah pemanfaatan yang berbeda targetnya. Hal ini dapat dilihat dar data beberapa tahun terakhir pada tabel dan grafik berikut ini.

**Tabel 3.23**

**Perbandingan realisasi tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2021	89,38%	89,52%
2022	89,49%	90,73%
2023	89,60%	92,34%
2024	94,00%	94,35%



Pada grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi persentase bangunan Gedung/public yang termanfaatkan mengalami peningkatan pada periode Renstra dari tahun 2021 sampai 2024.

### **3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan dibandingkan dengan target kinerja pada akhir Renstra Tahun 2026**

Pada akhir pelaksanaan Renstra di targetkan persentase bangunan/Gedung public yang termanfaatkan sebesar 96,00% . Maka jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 maka capaiannya terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.24**  
**Perbandingan realisasi kinerja 2024**  
**Terhadap target akhir Renstra**

<b>NO</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Target Akhir Renstra (2026)</b>	<b>Capaian</b>
1	Persentase bangunan/gedung publik yang termanfaatkan	94,35%	96,00%	98,28%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi tahun 2024 sebesar 94,35% sedangkan target pada akhir renstra sebesar 96,00% artinya realisasi capaian kinerja terhadap akhir renstra adalah sebesar 98,28%. Setelah memperhatikan capaian kinerja tersebut Dinas PUPRPERKIM optimis akan mencapai target akhir renstra.

### **4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja Tingkat Provinsi dan Nasional**

Indikator persentase bangunan/Gedung public yang termanfaatkan merupakan indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan dan Dinas PUPR Kabupaten HSS indikator yang digunakan adalah persentase bangunan Gedung yang laik fungsi hal ini menunjukkan perbedaan rumusan indikator yang digunakan sehingga tidak dapat di perbandingkan.

Indikator persentase bangunan/Gedung public yang termanfaatkan merupakan indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan dan tidak ada dalam indikator Tingkat provinsi maka datanya

tidak bisa diperbandingkan

Indikator persentase bangunan/Gedung public yang termanfaatkan merupakan indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan dan tidak ada dalam indikator Tingkat Nasional maka datanya tidak bisa diperbandingkan

**5. Analisis program dan kegiatan/sub kegiatan penunjang tercapainya keberhasilan dan permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja**

Kinerja penyediaan sarana dan prasarana public Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2024 telah berhasil melakukan rehabilitasi dan Pembangunan Gedung yang dapat di manfaatkan untuk pelayanan kepada Masyarakat. Keberhasilan ini karena adanya ketersediaan anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan Pembangunan tersebut melalui program dan kegiatan yaitu :

- Program Penataan Bangunan Gedung melalui kegiatan Rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatannya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- Sub kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
- Sub kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- Program penataan bangunan dan lingkungannya
- Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan

Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

Ada 5 bangunan pembangunan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu :

- a. Pembangunan aula kantor kesbangpol Kabupaten Balangan
- b. Pembangunan Mess Pegawai Kejaksaan Negeri Balangan
- c. Pembuatan site development Gudang KPU Kabupaten Balangan
- d. Penambahan Ruang kerja kantor DPLH Kabupaten Balangan
- e. Pembangunan Wisma Kabupaten Balangan

**Foto-Foto kegiatan**





## 6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif Solusi yang akan dilaksanakan

**Keberhasilan** : Beberapa upaya nyata yang telah dilakukan untuk memastikan bangunan/gedung publik dapat termanfaatkan dengan optimal pada tahun 2024 antara lain:

- a. Revitalisasi dan Rehabilitasi Bangunan Publik: Banyak bangunan/gedung publik yang telah dilakukan revitalisasi dan rehabilitasi untuk memperbaiki kondisi fisik dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Gedung-gedung yang dulunya tidak terpakai atau kurang dimanfaatkan telah diperbaharui agar dapat berfungsi dengan lebih optimal.
- b. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Komunitas: Untuk meningkatkan pemanfaatan gedung publik, pemerintah juga bekerja sama dengan sektor swasta dan komunitas. Dalam beberapa kasus, sektor swasta diminta untuk berpartisipasi dalam pengelolaan gedung publik melalui kemitraan atau penyediaan fasilitas tambahan yang

dibutuhkan oleh masyarakat.

- c. Penyusunan Rencana Pengelolaan Gedung Publik: Pemerintah melalui instansi terkait menyusun rencana pengelolaan yang lebih terstruktur untuk setiap bangunan publik. Ini mencakup penentuan fungsi gedung, perawatan, serta pemanfaatannya untuk kegiatan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti penggunaan ruang untuk pusat komunitas, pendidikan, atau tempat pelayanan publik.

**Kegagalan :** Meskipun capaian persentase pemanfaatan gedung publik sudah cukup baik, beberapa hambatan masih ditemui dalam pengoptimalan penggunaan bangunan/gedung publik, antara lain:

- a. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya: Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran untuk rehabilitasi dan perawatan gedung publik. Meskipun beberapa bangunan telah selesai dibangun, tidak semua gedung mendapatkan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan jangka panjang dan perbaikan fasilitas pendukung.
- b. Perubahan Kebutuhan Masyarakat: Terkadang, bangunan/gedung yang dibangun dengan satu fungsi tertentu tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Misalnya, gedung yang awalnya dibangun untuk kepentingan administrasi, kini kurang diminati karena masyarakat membutuhkan fasilitas yang lebih bersifat sosial atau ekonomi.

**Solusi :**

- a. Prioritasi Pemeliharaan Berdasarkan Kebutuhan : Pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi gedung-gedung publik yang ada dan memprioritaskan perbaikan pada bangunan yang paling membutuhkan perhatian segera. Pemeliharaan preventif yang terencana, berdasarkan penilaian kondisi, akan lebih efisien daripada perbaikan besar yang terpaksa dilakukan karena kerusakan yang lebih parah.
- b. Optimalisasi Penggunaan Gedung : Pengelolaan gedung publik dapat lebih efisien dengan memastikan bahwa bangunan tersebut digunakan secara maksimal, seperti dengan mengubah fungsi

sebagian ruangan agar dapat digunakan lebih banyak pihak atau untuk berbagai keperluan. Ini bisa meningkatkan pendapatan dari sewa ruangan atau fasilitas yang dapat digunakan untuk perawatan gedung.

- c. **Pembangunan Gedung Multi-Fungsi** : Untuk mengantisipasi kebutuhan yang terus berkembang, gedung bisa dirancang dengan konsep multi-fungsi sejak awal. Misalnya, sebuah gedung bisa digunakan untuk administrasi di satu lantai, pusat pelatihan atau ruang komunitas di lantai lain, dan ruang bisnis atau pusat ekonomi di lantai lainnya. Ini memungkinkan bangunan tetap relevan untuk berbagai fungsi seiring waktu.
  - d. **Analisis Kebutuhan Berkala** : Untuk memastikan gedung selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat, penting untuk melakukan analisis kebutuhan secara berkala. Pemerintah atau pengelola gedung bisa melakukan survei atau konsultasi dengan masyarakat untuk mengetahui perubahan dalam pola penggunaan gedung dan menyesuaikan fungsinya secara tepat waktu.
- 7. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja**

Salah satu sumber daya yang dibutuhkan dalam mencapai kinerja yaitu ketersediaan anggaran. Adapun anggaran yang telah digunakan dan direalisasikan, sebagai berikut :

**Tabel 3.25**

**Realisasi kinerja dan anggaran program penataan bangunan Gedung Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan/gedung sesuai standart	94,00%	94,35%	100,37%
1	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan/gedung publik dalam kondisi baik	94,00%	94,35%	100,37%
1	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	100 Bangunan gedung	90 Bangunan gedung	90,00%
2	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 dok	1 dok	100,00%
3	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	260 dok	220 dok	84,62%
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Bangunan yang ditata	28 Buah	25 Buah	89,29%
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan yang ditata	28 Buah	25 Buah	89,29%
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	28 Buah	25 Buah	89,29%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			RP	RP	%	
	Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan/gedung sesuai standart				
1	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	71.823.050.000	64.862.538.578	90,31	90,00%
2	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	450.636.000	349.738.100	77,61	100,00%
3	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	168.921.288.600	143.617.249.693	85,02	84,62%
4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	76.578.434.450	68.057.560.568	88,87	89,29%
<b>Jumlah</b>			<b>317.773.409.050</b>	<b>276.887.086.939</b>	<b>87,13</b>	<b>90,98%</b>

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan karena terjadinya negosiasi harga pada proses pengadaan yang kurang dari nilai pagu anggaran, serta adanya kegiatan mengalami adendum minus akibat keadaan di lapangan yang lokasi tidak mendukung dan adanya pekerjaan tidak bisa di kerjakan berhubung lokasi yang belum siap

Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Kualitas Pengaturan dan pembinaan tata ruang		
Indikator Kinerja	6	Persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang

Pada tahun 2024, capaian kinerja terkait persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya pengelolaan dan pengaturan ruang di seluruh wilayah. Penataan ruang yang terencana dan terstruktur merupakan kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemahaman yang baik terkait kebijakan penataan ruang membantu menciptakan wilayah yang terorganisir, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Hingga akhir tahun 2024, persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang telah mencapai 42%, yang mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam penyusunan dan implementasi dokumen perencanaan ruang. Ini termasuk dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta dokumen kebijakan lainnya yang mengatur penggunaan lahan, pemukiman, infrastruktur, dan perlindungan lingkungan. Capaian ini juga mencakup dokumen-dokumen yang sudah disahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan yang sedang dalam tahap evaluasi untuk pengesahan lebih lanjut. Peningkatan jumlah dokumen yang ditetapkan ini menandakan bahwa lebih banyak daerah telah menyusun dan menegakkan kebijakan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan penggunaan pola ruang yang tertib akan mengarahkan Pembangunan yang berkelanjutan. Ketersediaan regulasi yang mengatur rencana tata ruang dan lebih spesifik dalam rencana detail tata ruang, akan mempermudah dalam peningkatan investasi daerah.

### 1. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Perbandingan target dan realisasi kinerja persentase dokumen

penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang

**Tabel 3.26**

**Perbandingan realisasi kinerja persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang dengan target 2024**

Sasaran Strategis IV Meningkatnya Kualitas Pengaturan dan pembinaan tata ruang				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang	42,00%	42,00%	100,00%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2024 telah tercapai artinya capaian kinerja indikator tersebut dapat di ketegorkan **Sangat Memuaskan.**

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun lalu**

Sesuai dengan penyesuaian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 maka berikut adalah grafik perbandingan target dan realisasi kinerja persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang beberapa tahun terakhir

**Tabel 3.28**

**Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan beberapa Tahun sebelumnya**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2021	14,00%	14,00%
2022	20,00%	20,00%
2023	34,50%	25,50%
2024	42,00%	42,00%



Pada grafik diatas dapat dilihat capaian target pada tahun 2021 dan 2022 tercapai sedangkan pada tahun 2023 tidak tercapai karena masih ada kendala dalam penyusunan RTRW Kabupaten Balangan yang pada saat ini masih dalam proses sinkronisasi dengan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan sedang untuk tahun 2024 target bisa di capai Kembali.

### 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir Renstra

Adapun realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan pada akhir periode Renstra tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.29**

#### **Perbandingan realisasi Persentase kinerja terhadap target akhir Renstra Tahun 2026**

NO	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian
1	Persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang	42,00%	64,00%	65,63%

Dari capaian realisasi indikator kinerja utama tahun 2024 ini sebesar 42,00% dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2026 sebesar 65,63% masih belum tercapai, maka selanjutnya perlu Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja sampai akhir periode Renstra. Sebagai tindak lanjut (action plan) untuk mencapai target

pada tahun - tahun berikutnya, antara lain :

- a. Meningkatkan beberapa usulan kegiatan yang dananya baik bersumber dari APBD Kabupaten Balangan
- b. Meningkatkan konsultasi dengan pemerintah Provinsi Kalsel dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia

#### **4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi atau nasional**

Indikator yang di gunakan oleh Dinas PUPR Kabupaten HSS adalah Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang ini dapat kita lihat bahwa indikator yang digunakan berbeda rumusnya dengan yang digunakan oleh Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan sehingga tidak dapat di perbandingkan realisasi capaiannya.

Indikator kinerja yang digunakan Oleh Dinas PUPR Provinsi adalah Nilai penyelenggaraan penataan ruang Dengan demikian pengukuran indikator kinerjanya berbeda sehingga tidak bisa diperbandingkan.

Indikator kinerja yang digunakan Tingkat nasional tersusunnya Rencata Tata Ruang Nasional (RTRW) sedangkan Kabupaten adalah turunan dari RTRWN tersebut Dimana berupa RTRW dan RDTR. Dengan demikian pengukuran indikator kinerjanya berbeda sehingga tidak bisa diperbandingkan.

#### **5. Analisis program dan kegiatan untuk mencapai kinerja**

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator Persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang yaitu melalui program penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi penetapan RTRW Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp.1.016.028.500,00 dalam sub kegiatan ini dilaksanakan koordinasi dan konsultasi RTRW serta penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Balangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.960.632.842,00 dengan persentase realisasi keuangan 94,55% dan realisasi fisik 100%,

dalam kegiatan ini di laksanakan penyusunan dokumen Arahan pemanfaatan ruang Meander Sungai Balangan di Kecamatan Paringin untuk pengembangan Pariwisata, Penyusunan Dokumen arahan pengembangan dan deliniasi Kawasan perkotaan Putat Basiun, Konsultasi perbaikan muatan substansi revisi RTRW Kabupaten Balangan, Penyusunan dokumen arahan penataan kawasan permukiman sekitar pasar Batumandi, Penyusunan dokumen arahan penataan kawasan permukiman sekitar bending pitap, Penyusunan dokumen Arahan Penataan kawasan permukiman sekitar Sungai Balangan di Kecamatan Lampihong, dan Penyusunan peta dasar perkotaan Halong.

- b. Sub kegiatan sistem informasi penataan ruang dengan pagu anggaran Rp.1.202.365.700,00 terealisasi sebesar Rp.1.101.998.972,00 dengan persentase realisasi keuangan 91,65% dan realisasi fisik 100%, dalam sub kegiatan ini dilaksanakan Penyusunan Dokumen Prioritas Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Jalan Nasional di Kawasan Dahai berdasarkan Potensi Kawasan dan Strategi pengembangan kawasan koridor jalan Mantimin – Lampihong.
- c. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan penataan ruang dengan pagu anggaran Rp.716.307.300,00 terealisasi sebesar Rp.709.107.487,00 dengan persentase realisasi keuangan 98,99% dan realisasi fisik 100%, dalam sub kegiatan ini dilaksanakan penyusunan Analisa Spasial area terbangun Kecamatan Batumandi, Penyusunan dokumen Arahan pengelolaan sempadan Sungai Balangan di Kecamatan Juai dan Kecamatan Halong berbasis spasial dan potensi Kawasan, Penyusunan dokumen arahan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong, Penyusunan dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Balangan Tahun 2024, dan Penyusunan Neraca penggunaan lahan perkotaan Mungkur Uyam.

## Foto Kegiatan Tata Ruang



**6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif Solusi yang akan dilaksanakan**

**Keberhasilan** : Berikut adalah beberapa upaya nyata yang telah dilakukan untuk mencapai capaian ini pada tahun 2024:

- a. Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Perencanaan Ruang: Pemerintah daerah bersama instansi terkait telah bekerja keras untuk menyusun dan menyetujui dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pengaturan ruang yang akan diterapkan di masing-masing wilayah, termasuk penggunaan lahan, pembagian zonasi, dan pembangunan infrastruktur.
- b. Pelaksanaan Program Penataan Ruang Berbasis Partisipatif: Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan penataan ruang, pemerintah daerah mengajak masyarakat dan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penetapan ruang. Program ini mencakup konsultasi publik, sosialisasi, dan penyuluhan mengenai pentingnya penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.
- c. Integrasi Penataan Ruang dengan Perencanaan Pembangunan Daerah: Salah satu upaya yang dilakukan adalah memastikan bahwa kebijakan penataan ruang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mendukung program pembangunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata ruang, sehingga pembangunan berjalan secara terencana dan tidak merusak lingkungan atau menyebabkan ketidakteraturan dalam penggunaan ruang.

**Kegagalan** : Meskipun capaian persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penataan ruang, antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya dan Anggaran: Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk menyusun, meninjau, dan memperbarui dokumen penataan ruang. Banyak daerah yang menghadapi kesulitan dalam menyediakan dana yang

cukup untuk proses perencanaan dan pengesahan kebijakan penataan ruang.

- b. Perbedaan Kepentingan Antar Pemangku Kepentingan: Dalam penyusunan dokumen penataan ruang, sering kali terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat.
- c. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga: Kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penataan ruang, baik di tingkat pusat maupun daerah, bisa menghambat kelancaran penyusunan dan implementasi kebijakan penataan ruang. Terkadang, kebijakan yang dibuat di tingkat pusat tidak langsung sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, sehingga perlu ada penyesuaian.

**Solusi :**

- a. Penyusunan Rencana Penataan Ruang yang Modular dan Bertahap : Untuk mengurangi beban anggaran, rencana penataan ruang bisa disusun dalam bentuk yang lebih modular atau bertahap. Proyek besar bisa dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dengan fokus pada prioritas yang paling mendesak terlebih dahulu. Misalnya, pengembangan kawasan tertentu yang lebih membutuhkan revitalisasi atau perbaikan infrastruktur.
- b. Penguatan Kapasitas Perencana dan Pengelola Penataan Ruang : Meningkatkan kapasitas dan keterampilan para perencana ruang, baik di tingkat lokal maupun daerah, dapat membantu mereka untuk mengelola anggaran dengan lebih efisien. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perencanaan berbasis data, para perencana dapat meminimalkan pemborosan dan mempercepat proses pengesahan kebijakan.
- c. Pendekatan Partisipatif dalam Proses Perencanaan : Mengintegrasikan partisipasi masyarakat secara aktif sejak awal dalam proses penyusunan dokumen penataan ruang akan membantu mengurangi ketegangan antara berbagai pihak. Melibatkan masyarakat dalam diskusi, survei, dan pertemuan-pertemuan terbuka

dapat membantu memahami kebutuhan mereka dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tercermin dalam rencana yang dibuat. Ini juga akan meningkatkan rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil.

- d. **Fasilitasi Dialog Antar Pemangku Kepentingan** : Memfasilitasi dialog atau mediasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mencari titik temu di antara perbedaan kepentingan. Forum-forum seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), atau pertemuan konsultasi publik yang melibatkan semua pihak dapat membantu dalam menciptakan pemahaman bersama dan kesepakatan yang saling menguntungkan.
  - e. **Pembentukan Tim Koordinasi Khusus Penataan Ruang** : Pembentukan tim koordinasi lintas lembaga yang terdiri dari perwakilan dari berbagai instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat memperlancar komunikasi dan kolaborasi. Tim ini dapat bertugas untuk menyusun kebijakan, merumuskan solusi, dan memonitor implementasi kebijakan penataan ruang secara terintegrasi, serta memastikan kebijakan pusat dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
  - f. **Penyusunan Kebijakan yang Fleksibel dan Adaptif** : Kebijakan penataan ruang yang fleksibel akan lebih mudah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Pemerintah pusat perlu merancang kebijakan dengan ruang lingkup yang tidak terlalu kaku, memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan konteks lokal yang lebih spesifik.
- 7. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja**

Dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya di Bidang Tata Ruang lebih kepada penggunaan teknologi baik dalam pelayanan terhadap informasi tata ruang.

Terkait dengan tata ruang memanfaatkan pada konsultasi melalui aplikasi Simtaru (system Informasi Tata Ruang) sehingga dalam layanan informasi dapat dijawab secara cepat dan efisien.

Sasaran Strategis V: Meningkatnya kualitas hasil konstruksi		
Indikator Kinerja	6	Persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak

Hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebagai acuan kebijakan regulasi kontrak konstruksi sangat diharapkan akan dapat mewujudkan industri konstruksi yang sehat dan mampu menghasilkan infrastruktur yang memberikan nilai manfaat yang tinggi khususnya kaitannya dengan pasar pemerintah dan juga pasar swasta. Aturan mengenai hal ini menjadi penting mengingat pemerintah adalah penyelenggara perekonomian negara yang kedudukannya jelas tidak sama dengan pihak swasta. Pentingnya aturan mengenai hal tersebut menjadi semakin dibutuhkan saat pihak swasta yang bekerjasama dengan pemerintah adalah pihak swasta asing. Berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah termasuk dalam menentukan bentuk kontrak konstruksi yang akan digunakan adalah bagian dari kebijakan.

Pada tahun 2024, capaian kinerja terkait persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek-proyek konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Persentase keberhasilan konstruksi yang sesuai dengan kontrak menjadi indikator penting dalam memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan anggaran proyek yang telah disepakati, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Hingga akhir tahun 2024, persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak tercatat mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan konstruksi yang transparan, efisien, dan akuntabel. Proyek-proyek konstruksi yang dikelola oleh pemerintah maupun kontraktor secara umum berhasil diselesaikan dengan memenuhi standar kualitas, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan dalam kontrak. Hal ini berkontribusi pada penguatan reputasi dan kredibilitas pihak-pihak terkait dalam sektor konstruksi.

#### **1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja tahun 2024**

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 capaian

kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan khususnya bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan, indikator yang menjadi penilaian utama adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.36**  
**Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target yang telah ditetapkan**

Sasaran Strategis V				
Meningkatnya kualitas hasil konstruksi				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak	100,00%	100,00%	100,00%

Berdasarkan tabel di atas bahwa realisasi persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak telah mencapai target. Hal ini di dapat dari rumus perhitungan sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak}}{\text{jumlah hasil konstruksi yang dilaksanakan}} \times 100\%$
---

$$= 1.611 / 1.611 \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2024 ada sebanyak 1.611 paket yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan yang mana terbagi ke dalam bidang-bidang :

- a. Bidang Binamarga sebanyak 233 paket pekerjaan
- b. Bidang Cipta Karya sebanyak 340 paket pekerjaan
- c. Bidang Sumber Daya Air sebanyak 275 paket pekerjaan
- d. Bidang Perkim sebanyak 763 paket pekerjaan.

Semua paket pekerjaan yang diatas telah di laksanakan sesuai dengan isi kontrak yang telah di perjanjikan sehingga hasil dari konstruksi yang sesuai dengan kontrak adalah 100%

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun lalu**

Berikut ini disajikan perkembangan data realisasi persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak tahun 2021-2024 yang terlihat pada tabel dan grafik berikut ini :

**Tabel 3.37**  
**Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Beberapa Tahun**  
**Sebelumnya**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	100,00%
2024	100,00%	100,00%



Pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi untuk persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak untuk setiap tahunnya mencapai target 100% di sini dalam artinya berapa jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan sesuai dengan jumlah paket pekerjaan yang akan di laksanakan pengawasannya.

**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir renstra**

**Tabel 3.38**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Akhir**  
**Renstra Tahun 2026**

NO	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian
1	Persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak	100,00%	100,00%	100,00%

Pada tabel di atas dalam artian bahwa capaian kinerja itu berdasarkan berapa jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.

#### **4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Provinsi dan Nasional**

Pada Dinas PUPR Kabupaten HSS tidak ada kinerja atau sasarnya berhubungan dengan bidang jasa konstruksi sehingga tidak dapat diperbandingkan. Indikator yang digunakan Dinas PUPR Provinsi Kalsel adalah Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Provinsi Kalsel sangat berbeda dengan indikator yang digunakan oleh Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan sehingga tidak bisa di perbandingkan. Indikator yang digunakan kementerian adalah Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional sangat berbeda dengan indikator yang digunakan oleh Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan sehingga tidak bisa di perbandingkan

#### **5. Analisis program dan kegiatan untuk mencapai kinerja**

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya indicator Persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak yaitu melalui program pengembangan jasa konstruksi dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi Dimana dalam kegiatan ini dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada para tukang-tukang dan memberikan sertifikat kepada tukang yang telah terampil.
- b. Sub kegiatan Pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi Dimana pada sub kegiatan ini dilakukan pelayanan kepada para pihak ketiga untuk bisa ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pekerjaan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.
- c. Sub kegiatan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di dalam sub kegiatan ini dilaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada para pelaku atau pihak yang terlibat dalam hal pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.

## Foto-Foto Kegiatan Bidang Jasa Konstruksi Tahun 2024



## 6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif Solusi yang akan dilaksanakan

**Keberhasilan :** Beberapa upaya nyata yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa hasil konstruksi sesuai dengan kontrak pada tahun 2024 antara lain:

- a. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Proyek Konstruksi: Pemerintah telah memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek konstruksi melalui pembentukan tim pengawas yang terlibat langsung dalam setiap tahap pekerjaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Tim ini bertugas memastikan bahwa pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang tertuang dalam kontrak.
- b. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Pemerintah dan sektor swasta juga terus melakukan pelatihan bagi tenaga ahli, pengawas proyek, dan kontraktor untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola proyek konstruksi. Peningkatan kapasitas ini meliputi aspek manajemen proyek, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, serta penerapan standar kualitas dan keselamatan yang tinggi dalam konstruksi.
- c. Penerapan Sistem Sertifikasi Kualitas Konstruksi: Untuk memastikan kualitas hasil konstruksi, pemerintah bekerja sama dengan lembaga sertifikasi untuk memberikan sertifikat kepada kontraktor yang telah memenuhi standar kualitas konstruksi yang ditetapkan. Sertifikasi ini menjadi jaminan bahwa proyek konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil akhirnya memenuhi harapan.

**Kegagalan :** Meskipun capaian persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak sudah menunjukkan hasil yang positif, ada beberapa hambatan yang mempengaruhi pencapaian yang lebih optimal, antara lain:

- a. Keterlambatan Pengadaan Material dan Sumber Daya: Salah satu hambatan utama adalah keterlambatan dalam pengadaan material atau sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek konstruksi. Masalah dalam rantai pasok atau fluktuasi harga bahan bangunan seringkali menyebabkan penundaan dalam proses konstruksi yang berpotensi mengganggu kesesuaian dengan jadwal kontrak.

- b. Masalah Kualitas Bahan Bangunan atau Subkontraktor: Dalam beberapa proyek, penggunaan bahan bangunan yang kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi atau ketidaksesuaian dari subkontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan bisa menyebabkan hasil konstruksi tidak sesuai dengan kontrak. Pemilihan bahan yang kurang tepat atau kinerja subkontraktor yang kurang baik sering menjadi faktor penghambat.
- c. Perubahan Kondisi Lapangan dan Force Majeure: Beberapa proyek konstruksi terpengaruh oleh faktor eksternal seperti cuaca buruk, bencana alam, atau masalah teknis di lapangan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Faktor-faktor ini terkadang mengakibatkan keterlambatan atau perubahan dalam pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Solusi :

- a. Koordinasi Tim Konstruksi yang Lebih Baik : Meningkatkan koordinasi antara tim perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek sangat penting. Tim yang terkoordinasi dengan baik dapat mendeteksi potensi masalah pengadaan material sejak dini dan mencari solusi sebelum masalah tersebut berkembang lebih besar. Komunikasi yang terbuka antara semua pihak yang terlibat dalam proyek dapat membantu mempercepat proses pengambilan keputusan.
- b. Pengawasan Lapangan yang Ketat : Setiap tahapan pekerjaan perlu diawasi dengan cermat untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan standar yang ditetapkan. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh manajer proyek, tetapi juga oleh pengawas kualitas yang khusus memeriksa mutu pekerjaan dan material.
- c. Penyusunan Jadwal yang Fleksibel : Rencana waktu proyek harus mengakomodasi kemungkinan adanya keterlambatan karena kondisi tak terduga. Misalnya, menambahkan buffer waktu pada jadwal proyek atau merancang jadwal yang lebih realistis dengan mempertimbangkan faktor cuaca atau bencana alam.
- d. Pemantauan Lingkungan dan Cuaca : Gunakan teknologi untuk memantau kondisi cuaca dan lingkungan di sekitar lokasi proyek.

Pemasangan sistem pemantauan cuaca real-time atau berbasis satelit dapat memberikan peringatan dini jika cuaca buruk atau kondisi alam yang ekstrem diprediksi.

- e. Evaluasi Keadaan Lapangan secara Berkala : Lakukan evaluasi kondisi lapangan secara berkala, terutama sebelum memulai pekerjaan besar. Ini bisa melibatkan pemeriksaan geoteknik, stabilitas tanah, dan kondisi alam yang bisa mempengaruhi proyek konstruksi.

**7. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja.**

Salah satu sumber daya yang digunakan untuk mencapai kinerja yaitu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Berikut ini disajikan realisasi fisik dan penyerapan anggaran program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.39**

**Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran Penunjang capaian Kinerja  
Persentase Hasil Konstruksi yang sesuai dengan kontrak**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			RP	RP	%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKS	Persentase jasa konstruksi yang terampil	5.317.113.000	4.866.253.376	91,52	100,00%
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	566.764.000	369.131.664	65,13	100,00%
1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	566.764.000	369.131.664	65,13	100,00%
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai capaian SPM SIPJAKI Kab/Kota	124.017.000	83.048.363	66,97	100,00%
2	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	124.017.000	83.048.363	66,97	100,00%
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	4.626.332.000	4.414.073.349	95,41	100,00%
3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	4.626.332.000	4.414.073.349	95,41	100,00%
<b>Jumlah</b>			<b>5.317.113.000</b>	<b>4.866.253.376</b>	<b>91,52</b>	<b>100,00%</b>

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah terealisasi sebesar 100,00% namun penyerapan keuangan sebesar 91,52%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 8,48%.

Adapun alasan realisasi keuangan tidak mencapai 100,00% karena adanya anggaran kegiatan Rapat atau pertemuan di luar kota yang tidak terealisasi ,dan juga adanya Belanja Perjalanan Dinas yang tidak terealisasi.

Sasaran Strategis VI: Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman		
Indikator Kinerja	8	Persentase kawasan permukiman yang layak

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan khususnya di Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman, indikator yang menjadi penilaian utama adalah sebagai berikut :

### 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis VI				
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase kawasan permukiman yang layak	91,71%	94,38%	102,91%

Sesuai dengan rumus perhitungannya

$\frac{\text{Luas permukiman yang layak dikawasan kumuh}}{\text{Luas permukiman dikawasan kumuh kabupaten Balangan}} \times 100\%$
--

$$44,97 \text{ ha} / 47,65 \times 100\% = 94,38\%$$

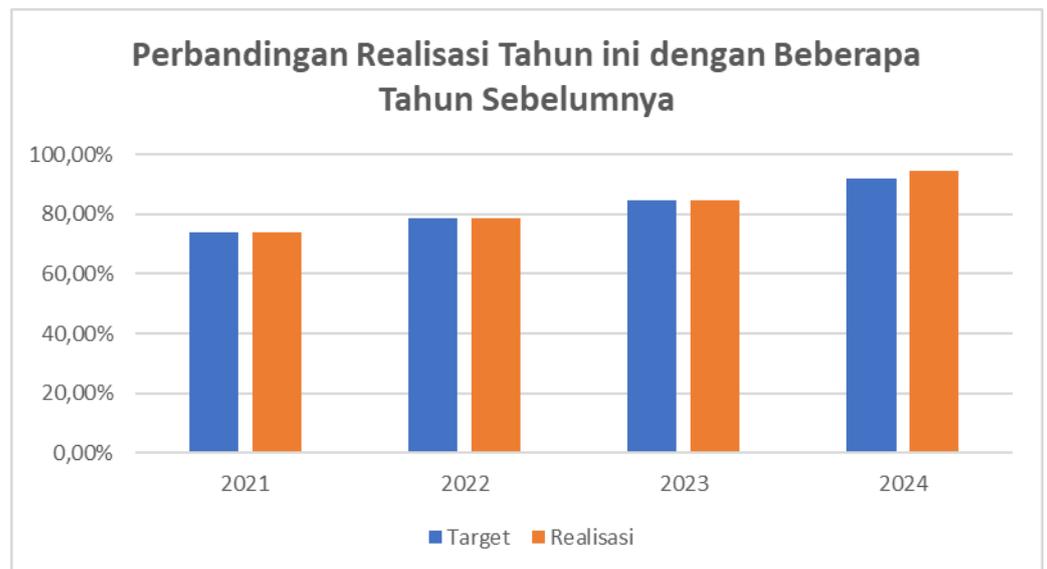
Pada tahun 2024 persentase Kawasan permukiman yang layak ditargetkan sebesar 91,71% terealisasi sebesar 94,38% sehingga capaian kinerjanya 102,91% dan dikategorikan capaian kinerja **Sangat Memuaskan**.

### 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun lalu

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja, berikut ini disajikan data perkembangan 4 (empat) tahun terakhir pelaksanaan Renstra yang dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

**Tabel 3.29**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Beberapa tahun**  
**Sebelumnya**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2021	74,08%	74,08%
2022	78,49%	78,49%
2023	84,78%	84,78%
2024	91,71%	94,38%



Pada grafik diatas terlihat bahwa perkembangan realisasi persentase Kawasan permukiman yang layak cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2024 telah tercapai 94,38% . Untuk mencapai kinerja ini telah banyak di dukung dari pekerjaan pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota, peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, dan perencanaan penyediaan PSU perumahan.

**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir Renstra**

**Tabel 3.30**

**Perbandingan capaian persentase Kawasan pemukiman yang layak**

**Tahun 2024 terhadap target akhir Renstra**

<b>NO</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Target Akhir Renstra (2026)</b>	<b>Capaian</b>
1	Persentase Kawasan pemukiman yang layak	94,38%	100,00%	94,38%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2024 telah mencapai 94,38%. Dan jika di bandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 (100%), maka capaian kinerja yang terealisasi pada tahun 2024 telah mencapai 94,38%. Dengan memperhatikan perkembangan capaian setiap tahun yang selalu meningkat, maka target pada akhir Renstra optimis akan di capai dengan rencana aksi untuk melaksanakan pekerjaan yang mendukung kinerja tersebut melalui anggaran APBD dan berusaha memperoleh anggaran dari pusat atau provinsi.

**4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Provinsi dan nasional**

Indikator yang digunakan Dinas Perumahan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten HSS adalah persentase kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas sedangkan dinas PUPRPERKIM menggunakan indikator Persentase Kawasan pemukiman yang layak artinya tidak ada persamaan dalam menggunakan rumusan tersebut sehingga tidak bisa di perbandingan realisasi capaian kinerjanya.

Indikator yang digunakan oleh Dinas Perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup provinsi Kalsel adalah Persentase Luasan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik ini menunjukkan adanya perbedaan indikator yang digunakan dengan Dinas PUPRPERKIM Kabupaten balangan sehingga tidak bisa di perbandingan

Indikator yang di gunakan oleh kementerian adalah persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living ini memiliki kesamaan pada objek yang digunakan dengan Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan yaitu sama sama menggunakan objek permukiman yang layak.

## 5. Analisis program dan kegiatan untuk mencapai kinerja

Penunjang tercapainya indikator persentase Kawasan permukiman yang layak dengan capaian realisasi sebesar 94,38%, yaitu dengan terealisasi beberapa pekerjaan konstruksi. Adapun rincian penjelasan dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perpipaan. Pada kegiatan ini telah dilaksanakan pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Desa Hukai Kecamatan Juai, Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Desa Hukai Kecamatan Juai dan Uprating instalasi pengolahan air (IPA) / penambahan sumur dalam terlindungi/broncaptering Desa Hukai Kecamatan Juai.

### Foto-Foto kegiatan





- b. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestic dalam daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pembangunan/penyediaan sub system pengolahan setempat. Pada kegiatan ini dilaksanakan pekerjaan Pembangunan tangki septik individual Desa Teluk Masjid Kecamatan Batumandi, Pembangunan tangki septik individual Desa Juuh Kecamatan Tebing Tinggi, Pembangunan tangki septik individual Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong.

### Foto-Foto kegiatan





- c. Kegiatan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dengan sub kegiatan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU. Pada kegiatan ini dilaksanakan pekerjaan Peningkatan jalan Awayan RT.02, peningkatan jalan Badalungga RT.01 dan peningkatan jalan Teluk masjid RT.01
- d. Kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan dengan sub kegiatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian. Adapun pekerjaan yang dilaksanakan di kegiatan ini antara lain Betonisasi jalan lingkungan Desa Suryatama RT.04, Pembangunan jalan lingkungan dekat Dekranasda Kecamatan Batumandi, Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan RT.16 kelurahan Paringin Selatan.

## Foto-Foto Kegiatan



### 6. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif Solusi yang akan dilaksanakan

**Keberhasilan :** Beberapa upaya nyata yang telah dilakukan untuk mencapai capaian ini pada tahun 2024 antara lain:

- a. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar: Salah satu fokus utama adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar, seperti penyediaan akses air bersih, listrik, sanitasi, dan jalan yang layak. Program-program seperti penyediaan saluran drainase, sistem pengelolaan sampah yang efisien, serta pembangunan fasilitas umum seperti taman dan fasilitas olahraga

juga diperhatikan untuk meningkatkan kualitas kawasan pemukiman.

- b. Perencanaan dan Penataan Ruang Terintegrasi: Pemerintah daerah mengembangkan dan menerapkan perencanaan tata ruang kota yang lebih terintegrasi untuk mendukung pembangunan kawasan pemukiman yang layak. Kebijakan penataan ruang ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan adanya RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), kawasan pemukiman dapat dibangun dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk yang sesuai, aksesibilitas, dan penggunaan lahan yang efisien.

**Kegagalan :** Meskipun capaian persentase kawasan pemukiman yang layak pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, terdapat beberapa hambatan yang masih mempengaruhi pencapaian yang lebih optimal, antara lain:

- a. Kurangnya Infrastruktur Penunjang di Kawasan Terpencil: Banyak daerah terpencil atau pedesaan yang kesulitan dalam mendapatkan akses ke infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan yang layak. Hal ini menyebabkan kualitas kawasan pemukiman di wilayah tersebut masih rendah dan memerlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut.
- b. Masalah Lingkungan dan Bencana Alam: Kawasan pemukiman yang terletak di daerah rawan bencana alam, seperti daerah banjir masih menghadapi tantangan besar dalam menciptakan kawasan yang layak huni. Upaya pemindahan atau relokasi seringkali terkendala oleh faktor geografis dan keterbatasan anggaran.

**Solusi :**

- a. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan : Pemerintah bisa merancang proyek pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Misalnya, menggunakan teknologi yang hemat biaya dan ramah lingkungan untuk pengolahan air bersih atau pembangunan sanitasi. Penggunaan energi

terbarukan seperti panel surya untuk penerangan di daerah terpencil juga dapat menjadi solusi efektif.

- b. Pendekatan Terpadu dalam Perencanaan : Selain membangun infrastruktur dasar, pendekatan yang lebih holistik yang melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga penting. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.
- c. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat : Masyarakat perlu diberikan pemahaman dan pelatihan tentang mitigasi risiko bencana, seperti langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir, gempa bumi, atau bencana lainnya. Ini akan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi bencana.
- d. Relokasi Secara Bertahap dan Terencana : Walaupun relokasi kawasan rawan bencana sering kali terkendala oleh faktor geografis dan anggaran, relokasi secara bertahap dan dengan pendekatan berbasis komunitas bisa menjadi solusi. Pemerintah bisa memulai dengan menyediakan akses ke tempat pemukiman yang lebih aman dengan dukungan infrastruktur dasar terlebih dahulu, sehingga masyarakat tidak merasa kehilangan tempat tinggal secara drastis.

## **7. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja**

Anggaran merupakan hasil dari artikulasi dari perumusan hasil strategi dan perencanaan yang telah di buat. Tahap penganggaran sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat mengagalkan perencanaan yang telah disusun.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Untuk persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi kinerja} = \frac{\text{(Capaian kinerja(\%))}}{\text{Realisasi Anggaran (\%)}} \times 100\%$$

Pada kinerja ini di ampu oleh 2 (dua) bidang yaitu bidang Cipta Karya dan bidang Perkim, sehingga jumlah pagu anggaran pada bidang Cipta Karya pada tahun 2024 yaitu Rp.55.489.342.200,00 dan realisasi sebesar Rp.43.839.621.867,00 kemudian pagu anggaran pada bidang perkim tahun 2024 sebesar Rp.191.900.557.440,00 dan terealisasi sebesar Rp.182.586.055.676,00. Dapat disimpulkan realisasi keuangan ini tidak sampai 100%, dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase kinerja pada level program yaitu 94,38% dan efisiensi keuangan sebesar 91,53%.

Sasaran Strategis VI: Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman		
Indikator Kinerja	9	Persentase Rumah layak huni

Pada tahun 2024, capaian kinerja terkait persentase rumah layak huni menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman. Rumah layak huni menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah melalui berbagai program pembangunan dan perbaikan rumah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas rumah yang dihuni masyarakat, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah. Hingga akhir tahun 2024, persentase rumah layak huni di seluruh wilayah tercatat mencapai 97,14%, yang mencerminkan keberhasilan dalam mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni (RTLH). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kondisi perumahan, baik dari segi struktur bangunan, akses terhadap air bersih, sanitasi yang baik, serta ketersediaan fasilitas dasar lainnya. Proses perbaikan rumah layak huni dilakukan dengan pendekatan berbasis kebutuhan daerah dan kelompok sasaran yang paling membutuhkan.

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Balangan khususnya di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, indikator yang menjadi penilaian utama adalah sebagai berikut :

**1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024**

Sampai dengan tahun 2024 jumlah rumah layak huni yang ada di Kabupaten Balangan sebesar 42.393 unit dan rumah tidak layak huni sebesar 1.247 unit sedangkan total seluruh rumah yang ada di Kabupaten Balangan sebesar 43.640 unit.

Sesuai dengan rumus perhitungan persentase rumah layak huni yaitu:

$\text{Jumlah rumah layak huni} / \text{Total jumlah rumah Kabupaten Balangan} \times 100\%$
--

$42.393 \text{ unit} / 43.640 \text{ unit} = 97,14\%$

**Tabel 3.32**  
**Perbandingan Realisasi dengan Target**

Sasaran Strategis VI				
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
9	Persentase Rumah layak huni	96,00%	97,14%	101,19%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2024 sangat baik, ini dikarenakan realisasi capaian IKU tahun ini melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 97,14%, sedangkan target tahun 2024 adalah sebesar 96,00% dengan capaian kinerja 101,19%.

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun yang lalu**

Perbandingan realisasi persentase rumah layak huni dengan beberapa tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel dan grafik berikut ini.

**Tabel 3.33**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun**  
**Sebelumnya**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2021	90,28%	93,75%
2022	95,00%	93,91%
2023	95,00%	95,02%
2024	96,00%	97,14%



Pada grafik diatas terlihat bahwa perkembangan realisasi persentase rumah layak huni cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2024 telah tercapai 97,14% melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 96,00%. Untuk mencapai kinerja ini telah banyak di dukung dari selain dari anggaran APBD daerah juga di bantu oleh anggaran APBD Provinsi.

**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir Renstra**

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan disusun untuk periode 2021-2026, maka pada tahun 2024 merupakan pelaksanaan Renstra tahun ke empat. Adapun realisasinya dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.34**  
**Perbandingan capaian persentase rumah layak huni tahun**  
**2024 terhadap Target Akhir Renstra**

NO	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian
1	Persentase rumah layak huni	97,14%	97,00%	100,14%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2024 telah mencapai 97,14%. Dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 (97,00%), maka capaian kinerja yang terealisasi pada tahun 2024 telah mencapai 100,14% artinya target untuk akhir renstra telah di capai dan bertepatan juga dengan masa berakhirnya kepemimpinan kepala daerah yang lama.

**4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Provinsi atau nasional**

Indikator yang digunakan Dinas Perumahan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten HSS adalah persentase kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas sedangkan dinas PUPRPERKIM menggunakan indikator Persentase rumah layak huni sehingga tidak bisa diperbandingkan.

Indikator yang digunakan sama-sama menggunakan indikator persentase rumah layak huni kalau di lihat dari realisasi antara kedua dinas tersebut menunjukkan rumah layak huni yang ada di Kabupaten Balangan lebih besar di bandingkan dengan rumah layak huni yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan

Adapun perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.35**

**Perbandingan capaian kinerja Persentase rumah layak huni Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Balangan dengan Dinas Perkim Provinsi Kalsel dan Kementerian PUPR**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Kabupaten Balangan</b>				
1	Persentase Rumah layak Huni	96,00%	97,14%	101,19%
<b>Provinsi Kalsel</b>				
2	Persentase Rumah layak Huni	58,03%	58,03%	100,00%
<b>Kementerian PUPR</b>				
3	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	59,48%	59,48%	100,00%

Indikator yang di gunakan oleh kementerian adalah Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni sedikit agak berbeda menggunakan kata-kata nya tetapi memiliki kesamaan pada objek yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan rumah layak huni.

**5. Analisis program dan kegiatan untuk mencapai kinerja**

Penunjang tercapainya indikator persentase rumah layak huni dengan capaian realisasi sebesar 97,14% karena ditahun 2024 sebanyak 738 unit rumah yang dilakukan rehabilitasi melalui anggaran APBD kabupaten. Adapun sub kegiatan yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan yaitu Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan

berkembangnya permukiman kumuh di luar Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dengan pagu anggaran sebesar Rp.23.974.668.200,00 dan terealisasi sebesar 23.076.924.610,00 atau sebesar 96,26% sedangkan target kinerja sebesar 738 unit dan terealisasi 738 unit atau sebesar 100,00% hal ini berarti dapat dikategorikan **Sangat Memuaskan**.

#### Foto-Foto Kegiatan



## 6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif Solusi yang akan di laksanakan

**Keberhasilan :** Beberapa upaya nyata yang telah dilakukan untuk mencapai capaian ini pada tahun 2024 antara lain:

- a. Program Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): Pemerintah terus melaksanakan program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui skema bantuan pemerintah, rumah-rumah yang tergolong tidak layak huni diperbaiki atau dibangun baru dengan memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan, seperti struktur yang aman, fasilitas sanitasi yang baik, serta akses air bersih.
- b. Pengembangan Infrastruktur Pendukung: Selain perbaikan fisik rumah, pengembangan infrastruktur pendukung seperti jalan, saluran drainase, dan fasilitas umum lainnya juga dilakukan di kawasan pemukiman untuk meningkatkan kelayakan rumah. Infrastruktur yang baik berperan penting dalam menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat dan nyaman.

**Kegagalan :** Meskipun capaian persentase rumah layak huni pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi pencapaian yang lebih optimal, antara lain:

- a. Masalah Kepemilikan Lahan: Dalam beberapa kasus, masalah legalitas atau sengketa kepemilikan lahan seringkali menghambat pembangunan atau perbaikan rumah. Tanpa kepastian status hukum lahan, banyak masyarakat yang kesulitan untuk memperbaiki atau membangun rumah yang layak huni.
- b. Kurangnya Infrastruktur Pendukung di Daerah Tertinggal: Di daerah terpencil atau daerah dengan infrastruktur terbatas, kendala utama bukan hanya pada kondisi fisik rumah, tetapi juga pada ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Di beberapa daerah, meskipun rumahnya sudah diperbaiki, akses terhadap fasilitas dasar masih menjadi

masalah.

Solusi :

- a. Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat : Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas lahan dan proses untuk memperoleh sertifikat tanah. Program edukasi yang lebih luas bisa membantu masyarakat menghindari masalah hukum terkait tanah dan memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan status hukum lahan mereka jelas.
- b. Pembangunan Infrastruktur Dasar Secara Bertahap : Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan air bersih, dan sanitasi perlu dilakukan secara bertahap dan terencana. Pemerintah bisa memprioritaskan daerah-daerah yang paling membutuhkan, dengan memastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan tepat. Program pembangunan infrastruktur dapat dimulai dari daerah yang paling terisolasi, kemudian berkembang ke area yang lebih luas.
- c. Pendekatan Partisipatif dengan Masyarakat : Dalam pembangunan infrastruktur, melibatkan masyarakat lokal sangat penting. Masyarakat setempat dapat dilibatkan dalam merencanakan, membangun, dan merawat fasilitas yang dibutuhkan. Dengan pemberdayaan masyarakat, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan ikut menjaga keberlanjutan infrastruktur yang dibangun. Program pelatihan untuk keterampilan teknis terkait pembangunan infrastruktur bisa menjadi salah satu cara untuk melibatkan mereka.

## **7. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja**

Anggaran merupakan hasil dari artikulasi dari perumusan hasil strategi dan perencanaan yang telah dibuat. Tahap penganggaran sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Jumlah anggaran pada Bidang Perkim untuk penanganan rumah

tidak layak huni sebesar Rp.23.974.668.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.23.076.924.610,00. Dapat disimpulkan realisasi keuangan tidak sampai 100% artinya dapat dikatakan penggunaan anggaran dilakukan secara efisien. Adapun alasan kenapa tidak mencapai 100,00% realisasi keuangan karena Adanya lebih dalam penganggaran Honorarium Tenaga Teknis Fasilitator Lapangan serta anggaran perjalanan dinas yang tidak bisa direalisasikan lagi.

### 3.3 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2024

Disamping penilaian capaian kinerja, penilaian kinerja anggaran juga tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah input menjadi output, atau proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran didapat dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Total Realisasi Anggaran}}{\text{Total Alokasi Dana}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu}} \times 100 \%$$

Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebesar Rp.822.247.271.655,00 atau 87,03% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.944.827.912.597,00

**Tabel 3.40**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi**  
**Anggaran Dinas PUPRPERKIM 2021-2024**

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2021	178.848.365.530	97.417.402.610	54,47%
2022	389.100.189.510	331.598.172.950	85,22%
2023	572.031.479.723	483.699.867.547	84,56%
2024	944.827.912.597	822.247.271.655	87,03%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi anggaran tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sedangkan pada tahun 2023 ini

realisasi capaian menurun karena ada beberapa paketan pekerjaan yang mengalami putus kontrak sehingga berpengaruh terhadap realisasi keuangan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan, kemudian di tahun 2024 mengalami kenaikan lagi pada capaian realisasi keuangan.

**Tabel 3.41**

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  
Penunjang Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan jalan	193.482.511.350	151.119.999.797	78,11
			Kegiatan Penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota	193.482.511.350	151.119.999.797	78,11
			Pembangunan Jalan	18.223.610.000	13.597.098.448	74,61
			Rekonstruksi Jalan	173.523.881.100	136.901.250.785	78,89
			Rehabilitasi Jalan	262.960.000	236.155.564	89,81
		Persentase jembatan dalam kondisi mantap	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.472.060.250	385.495.000	26,19
			Program Penyelenggaraan jalan	55.448.885.250	42.941.801.272	77,44
			Kegiatan Penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota	55.448.885.250	42.941.801.272	77,44
			Pembangunan Jembatan	48.699.683.250	37.056.767.086	76,09
			Rehabilitasi Jembatan	6.396.794.500	5.809.662.186	90,82
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	352.407.500	75.372.000	21,39	
2	Meningkatnya kualitas pengendali banjir dan irigasi	Persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik	Program pengelolaan sumber daya air	19.133.900.000	18.368.998.441	96,00
			Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.133.900.000	18.368.998.441	96,00
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	11.349.090.000	10.856.522.991	95,66
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.784.810.000	7.512.475.450	96,50
			Program pengelolaan sumber daya air	50.714.987.750	49.988.474.701	98,57
		Persentase pengembangan pengendalian banjir	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.714.987.750	49.988.474.701	98,57
			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	35.797.937.440	35.470.418.201	99,09
			Normalisasi/Restorasi Sungai	11.114.090.000	10.796.222.000	97,14
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	469.260.310	411.278.500	87,64
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.154.770.000	1.149.890.000	99,58
		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2.178.930.000	2.160.666.000	99,16	

3	Meningkatnya pemanfaatan bangunan/Gedung publik	Persentase bangunan/Gedung public yang termanfaatkan	Program Penataan Bangunan Gedung	241.194.974.600	208.829.526.371	86,58
			Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	241.194.974.600	208.829.526.371	86,58
			Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	71.823.050.000	64.862.538.578	90,31
			Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	450.636.000	349.738.100	77,61
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	168.921.288.600	143.617.249.693	85,02
			Program Penataan bangunan gedung dan lingkungannya	76.578.434.450	68.057.560.568	88,87
			Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	76.578.434.450	68.057.560.568	88,87
			Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	76.578.434.450	68.057.560.568	88,87
4	Meningkatnya kualitas pengaturan dan pembinaan tata ruang	Persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang	2.934.701.500	2.771.739.301	94,45
			Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.016.028.500	960.632.842	94,55
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	1.016.028.500	960.632.842	94,55
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.202.365.700	1.101.998.972	91,65
			Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1.202.365.700	1.101.998.972	91,65
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	716.307.300	709.107.487	98,99
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	716.307.300	709.107.487	98,99

5	Meningkatnya kualitas hasil konstruksi	Persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak	Program pengembangan jasa konstruksi	5.317.113.000	4.866.253.376	91,52
			Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	566.764.000	369.131.664	65,13
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	566.764.000	369.131.664	65,13
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	124.017.000	83.048.363	66,97
			Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	124.017.000	83.048.363	66,97
			Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	4.626.332.000	4.414.073.349	95,41
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	4.626.332.000	4.414.073.349	95,41

6	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Kawasan permukiman yang layak	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	23.318.050.000	19.157.148.025	82,16
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	23.318.050.000	19.157.148.025	82,16
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	23.318.050.000	19.157.148.025	82,16
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	32.171.292.200	24.682.473.842	76,72
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.171.292.200	24.682.473.842	76,72
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	31.588.521.000	24.202.786.509	76,62
			Operasional dan Pemeliharaan sistem Pengelolaan Air limbah Domestik	582.771.200	479.687.333	82,31
			Program kawasan permukiman	5.489.889.000	4.570.585.157	83,25
			Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	331.153.500	125.473.939	37,89
			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	331.153.500	125.473.939	37,89
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	5.158.735.500	4.445.111.218	86,17
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	5.158.735.500	4.445.111.218	86,17
			Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	186.410.668.440	178.015.470.519	95,50
			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	186.410.668.440	178.015.470.519	95,50
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	251.395.000	227.403.650	90,46
		Penyediaan Prasarana, Sarana , dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	186.159.273.440	177.788.066.869	95,50	
		Persentase rumah layak huni	Program pengembangan perumahan	1.657.610.600	1.614.909.536	97,42
			Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	299.428.000	292.102.558	97,55
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	299.428.000	292.102.558	97,55
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.358.182.600	1.322.806.978	97,40
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	532.796.600	513.423.523	96,36
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	825.386.000	809.383.455	98,06
			Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	23.974.668.200	23.076.924.610	96,26
			Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	23.974.668.200	23.076.924.610	96,26
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	23.974.668.200	23.076.924.610	96,26

### 3.4 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

LAPORAN ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024					
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Persentase capaian kinerja	Persentase penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	102,71	78,11	76,05
		Persentase jembatan dalam kondisi mantap	100	77,44	77,44
2	Meningkatnya kualitas pengendali banjir dan irigasi	Persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik	100	96	96
		Persentase pengembangan pengendalian banjir	116,78	98,57	84,41
3	Meningkatnya pemanfaatan bangunan/Gedung publik	Persentase bangunan/Gedung public yang termanfaatkan	100,37	87,73	87,41
4	Meningkatnya kualitas pengaturan dan pembinaan tata ruang	Persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang	100	94,45	94,45
5	Meningkatnya kualitas hasil konstruksi	Persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak	100	91,52	91,52
6	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Kawasan pemukiman yang layak	102,91	84,41	82,02
		Persentase rumah layak huni	101,19	96,84	95,7

Perencanaan penganggaran perlu berfokus pada kegiatan prioritas yang berdampak pada dukungan dana dari pemerintah pusat seperti DAK atau dana lainnya. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan dapat melakukan efisiensi dalam Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Balangan. Untuk perencanaan penganggaran di masa datang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan perlu tetap memperhatikan dan berfokus pada Pembangunan infrastruktur tematik sesuai arahan Kemenpu agar pendanaan dapat dilakukan secara kolaborasi sehingga penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara efisien.

### 3.5. Kinerja Lainnya

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan selain melaksanakan tugas dan fungsi juga melakukan dukungan terhadap program dan kegiatan lain seperti :

a. Pencapaian SDGs

SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam Upaya mensejahterakan Masyarakat, oleh karena itu untuk mendukung Pembangunan yang berkelanjutan tersebut pada tahun 2024 telah dilakukan berupa kegiatan air bersih dan sanitasi. Adapun capaian air bersih tahun 2024 adalah sebesar 89,13% hal ini meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2022 yaitu sebesar 87,76%. Begitu pula capaian untuk sanitasi pada tahun 2024 sebesar 98,85% .

b. Pencapaian SPM

Adapun standar pelayanan minimal (SPM) yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota
2. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses ke tangki septik
3. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota
4. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Untuk capaiannya dapat di lihat pada tabel di bawah ini

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100%	89,13%	89,13%
2	Persentase Rumah tangga yang dapat mengakses ke tangki septik	100%	98,85%	98,85%
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100,00%

c. Pencapaian pengurangan Stunting

Dalam hal mengurangi angka stunting dan pencegahannya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan telah berperan ikut serta dengan kegiatan melalui Ketersediaan air bersih layak dan Ketersediaan akses sanitasi layak. Pengurangan stunting merupakan target nasional, Dimana pada tahun 2022 capaian pengurangan stunting Kabupaten Balangan sebesar 14,91% masih tinggi dibandingkan dengan target nasional yaitu hanya 14%, namun pada tahun 2023 capaian pengurangan angka stunting adalah 14,61% dan di tahun 2024 pengurangan angka stunting adalah 14,58%

d. Pencapaian Pengurangan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Balangan tercatat sejumlah 7.074 Jiwa yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan. Kemiskinan ekstrem ini adalah orang-orang yang berada secara ekonomi paling bawah sehingga dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari tidak bisa atau kurang. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan pada tahun 2024 telah melakukan beberapa program dan kegiatan dalam Upaya pengurangan kemiskinan ekstrem tersebut, Adapun kegiatan yang dilakukan adalah menyediakan air bersih layak, sanitasi layak dan rumah layak huni. Kegiatan ini telah mengurangi angka kemiskinan ekstrem semula 5,22 menjadi 4,87 namun pengurangan angka kemiskinan tersebut bukan semata-mata dari program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan sendiri tetapi adanya peran semua stakeholder yang terlibat.

e. Dukungan Terhadap pengendalian inflasi daerah

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan merupakan salah satu anggota dari tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Kabupaten Balangan. TPID ini hampir setiap pekan melakukan atau mengikuti rakor dengan Kementerian RI secara Zoom Meeting. Dimana dalam pengendalian inflasi ada beberapa strategi yang terkenal dengan

strategi 4K yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi serta Komunikasi yang efektif. Dalam rangka mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa tersebut dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan telah melakukan beberapa program dan kegiatan seperti Pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan/rehabilitasi/rekonstruksi jalan dan jembatan serta pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sehingga sampai saat ini inflasi di Kabupaten Balangan tidak terjadi, hal ini dibuktikan dengan angka IPH (Indeks Perkembangan Harga) sektoral dibawah 2.

### **3.6 Daftar Prestasi SKPD Tingkat Nasional dan Provinsi**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan sepanjang tahun 2024 belum pernah mendapatkan penghargaan atau prestasi baik ditingkat Nasional maupun Provinsi. Namun demikian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkontribusi terhadap pencapaian penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Balangan antara lain Penghargaan atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024, Penghargaan *Inovation Government Word*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.

Dari analisa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2024, selain masalah administrasi, masalah teknis di lapangan menjadi kendala utama dalam realisasi program dan kegiatan oleh karena itu untuk pelaksanaan di tahun 2024 ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu ;

1. **Pengawasan Proyek yang Lebih Ketat:** Diperlukan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana teknis dan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini bisa melibatkan pemantauan langsung di lapangan, audit berkala, dan penggunaan teknologi untuk pelaporan real-time.
2. **Peningkatan Kompetensi Pengawas Lapangan:** Pengawasan lapangan yang kurang optimal bisa menyebabkan masalah teknis. Oleh karena itu, perlu diadakan pelatihan bagi pengawas lapangan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang teknik konstruksi, material, dan pemecahan masalah yang mungkin timbul.
3. **Perencanaan yang Lebih Detail dan Realistis:** Perencanaan teknis yang matang dan detail sangat penting untuk menghindari kesalahan pelaksanaan di lapangan. Pada tahun 2024, perlu dilakukan kajian lebih mendalam dalam penyusunan desain teknis proyek agar dapat memitigasi masalah yang muncul terkait kondisi lapangan atau hambatan teknis lainnya.

4. **Fleksibilitas dalam Rencana Teknis:** Perubahan kondisi lapangan yang tak terduga seringkali menghambat proses konstruksi. Oleh karena itu, perlu ada fleksibilitas dalam perencanaan yang memungkinkan penyesuaian cepat terhadap kondisi lapangan yang berubah.
5. **Penyediaan Tenaga Kerja yang Cakap dan Terlatih:** Masalah teknis sering muncul akibat kurangnya keterampilan tenaga kerja atau subkontraktor yang tidak berkompeten. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang terlibat memiliki kualifikasi yang tepat melalui pelatihan atau sertifikasi.
6. **Koordinasi Tim yang Lebih Baik:** Koordinasi antara berbagai pihak terkait (tim perencanaan, pengawas, kontraktor, dan subkontraktor) harus ditingkatkan untuk menghindari miskomunikasi atau penundaan pekerjaan yang bisa mengganggu jalannya proyek.
7. **Identifikasi dan Pengelolaan Risiko di Lapangan:** Sebelum memulai proyek, penting untuk melakukan analisis risiko yang menyeluruh dan menyusun rencana mitigasi risiko. Program pengelolaan risiko yang baik akan membantu untuk menghadapi perubahan kondisi lapangan atau masalah teknis lainnya tanpa mengganggu jadwal dan anggaran.
8. **Kontrol Kualitas Bahan Bangunan:** Penggunaan bahan yang berkualitas rendah atau tidak sesuai dengan spesifikasi dapat mengakibatkan masalah teknis yang merugikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan kualitas bahan secara rutin sebelum digunakan dalam proyek.
9. **Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholder:** Kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan stakeholder lainnya sangat penting untuk mengatasi masalah yang muncul di lapangan. Misalnya, masalah aksesibilitas atau izin yang diperlukan untuk pelaksanaan konstruksi.
10. **Forum Diskusi dan Rapat Koordinasi:** Adakan forum diskusi dan rapat koordinasi secara rutin, terutama ketika ada perubahan kondisi atau masalah teknis di lapangan yang perlu segera dibahas bersama.
11. **Penyederhanaan Proses Pengadaan:** Proses pengadaan material dan layanan yang lebih efisien dapat menghindari keterlambatan yang disebabkan oleh masalah pengadaan. Hal ini termasuk pengelolaan kontrak dengan pemasok

dan subkontraktor yang lebih transparan dan berbasis pada kinerja.

12. **Perbaikan Prosedur Administrasi dan Pelaporan:** Masalah administrasi yang kurang efisien bisa menghambat kelancaran proyek. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam prosedur administrasi dan pelaporan, termasuk pelaporan keuangan, pengadaan bahan, dan jadwal pelaksanaan proyek.
13. **Partisipasi Masyarakat:** Dalam beberapa proyek, masyarakat setempat juga dapat dilibatkan dalam pemantauan dan pengawasan untuk memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka dan tidak menimbulkan dampak negatif.

Paringin, Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BALANGAN



RAHMADIAH,ST,MT

NIP.19760309 200604 2 007